MUKHLISHI

MADURA
Serambi Madinah

Potret Kebebasan Beragama di Madura
Perspektif Ulama BASRA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP
PGRI
PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
SUMENEP
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Mukhlishi

MADURA
Serambi Madinah

Potret Kebebasan Beragama di Madura Perspektif Ulama BASRA

CV.ABIDAMAHRAN

Madura Serambi Madinah
Potret Kebebasan Beragama di Madura
Perspektif Ulama BASRA

Copyright @2018, Hal cipta dilindungi undang-undang.

Penulis:
Mukhlishi

Penyelaras bahasa
Surya Fajar Rasyid

Penata letak
Anshari

Cover
L Z

ISBN : 978-602-51160-1-8

Cetakan pertama, Januari 2018

Diterbitkan oleh:
CV. Abida Mahran
Jl. Raya Gapura KM 11 Gapura Sumenep

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk dan cara apapun termasuk mengcopy tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengantar Penulis

Para ulama Madura yang terkumpul dalam BASRA acapkali menjadi gawang dan penentu tentang masa depan Madura. Gagasan dan gerakan sosial yang dilakukan BASRA secara langsung dianggap sebagai representasi masyarakat Madura, sehingga berbagai gagasan tentang Madura yang diusung oleh kiai-kiai BASRA juga menjadi kesepakatan masyarakat. Salah satu gagasan besar tentang pembangunan Madura yang hendak diperjuangkan oleh BASRA adalah menciptakan kehidupan Madura yang tetap kental dengan nilai-nilai religiusitasnya. Gagasan kiai BASRA tentang kebebasan agama di Madura menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diangkat ke permukaan, sehingga gerakan dan pemikiran kiai-kiai BASRA tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi agama lain, karena secara teoritis, pihak dominan acapkali menafikan keberadaan pihak minoritas, sehingga pemikiran tentang masalah kebebasan agama yang menjadi cita-cita BASRA di Madura

merupakan sesuatu yang faktual untuk ditransformasi di tengah wacana menjadikan Madura sebagai serambi Madinah, peta dan formulasi pemikiran tentang kebebasan agama yang ditawarkan oleh para kiai Madura dapat menjadi spektrum dalam membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat Madura yang universal dan plural.

Komunitas yang mewadahi para Ulama Madura, BASRA acapkali menjadi gawang dan penentu tentang masa depan Madura. Gagasan dan gerakan sosial yang dilakukan BASRA secara langsung dianggap sebagai representasi masyarakat Madura, sehingga berbagai gagasan tentang Madura yang diusung oleh kiai-kiai BASRA juga menjadi kesepakatan masyarakat. Salah satu gagasan besar tentang pembangunan Madura yang hendak diperjuangkan oleh BASRA adalah menciptakan kehidupan Madura yang tetap kental dengan nilai-nilai religiusitasnya. Secara otomatis, nilai-nilai keislaman akan menjadi nuansa kental dalam pembangunan Madura, karena BASRA merupakan wadah para elite-elite agama Islam, sehingga tidak mustahil dalam setiap gagasan dan gerakan yang ditawarkan akan menimbulkan sesuatu yang bias, terutama terhadap penganut agama lain, apalagi BASRA hanya mewadahi satu elit agama (Islam) dan tidak mengakomodir elit agama yang lain. Padahal, pembangunan dan pengembangan Madura harus didasarkan pada pemikiran semua pihak, tidak hanya didominasi oleh pemikiran pihak dominan, tetapi juga elit-elit agama lain, sehingga akan terjadi sinergi yang ideal dalam membangun Madura, terutama dalam masalah kebebasan beragama dan perlindungan terhadap agama lain.

Posisi ulama (kiai) di tengah-tengah masyarakat Madura kerapkali diposisikan lebih tinggi dari pada posisi sosial apapun, bahkan dalam derajat tertentu Kiai terposisikan sebagai penguasa sosial dan rujukan yang esensial dalam memetakan dan mengarahkan masa depan pembangunan Madura yang dianggap mampu menggerakkan masyarakat secara kultural, apalagi elit-elit melebur dalam satu komunitas kultural yang kuat, seperti BASRA (Badan Silaturrahim Ulama Madura). Sebagai komunitas yang mewadahi para kiai Madura, BASRA acapkali menjadi gawang dan penentu tentang masa depan Madura. Gagasan dan gerakan sosial yang dilakukan BASRA secara langsung dianggap sebagai representasi masyarakat Madura, sehingga berbagai gagasan tentang Madura yang diusung oleh kiai-kiai BASRA juga menjadi kesepakatan masyarakat. Salah satu gagasan besar tentang pembangunan Madura yang hendak diperjuangkan oleh BASRA adalah menciptakan kehidupan Madura yang tetap kental dengan nilai-nilai religiusitasnya. Gagasan kiai BASRA tentang kebebasan agama di Madura menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diangkat ke permukaan, sehingga gerakan dan pemikiran kiai-kiai BASRA tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi agama lain, karena secara teoritis, pihak dominan acapkali menafikan keberadaan pihak minoritas, sehingga pemikiran tentang masalah kebebasan agama yang menjadi cita-cita BASRA di Madura merupakan sesuatu yang faktual untuk ditransformasi di tengah wacana menjadikan Madura sebagai serambi Madinah, peta dan formulasi pemikiran tentang kebebasan agama yang ditawarkan oleh para kiai Madura dapat menjadi spektrum

dalam membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat Madura yang universal dan plural.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penting berkaitan dengan konstruksi pemikiran ulama BASRA tentang kebebasan agama di Madura. Sebagai elit sosial di Madura, kiai BASRA memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memaknai kebebasan agama di Madura. Sekalipun, umat Islam menjadi penganut agama terbesar di Madura, para ulama BASRA, memiliki cara pandang yang cukup moderat. Prinsip kebebasan beragama yang melandasi cara berfikir mereka adalah komitmen terhadap NKRI dengan segala produk yang ada di dalamnya. Salah satu produk konsekwensi dari NKRI adalah adalah jaminan terhadap keragaman dalam semua aspek, termasuk di dalamnya keragaman dalam beragama.Intinya, NKRI memberikan jaminan kebebasan untuk menganut agama yang diyakini kebenarannya, tanpa diintervensi oleh siapapun.

Mengembalikan kebebasan beragama terhadap NKRI, sebagaimana menjadi dasar berfikir ulama BASRA, menunjukkan tentang pola pikir terbuka terhadap penganut agama lain. Kebebasan beragama yang mendapatkan perlindungan dalam NKRI, pada gilirannya melegitimasi sikap dan perilaku ulama BASRA dalam memaknai perbedaan agama di Madura. Mencermati konteks itu, ulama di Madura, terutama BASRA sejatinya tidak pernah mempersoalkan kebebasan beragama selama dilakukan dengan konteks yang wajar dan tidak menganggu penganut agama lain. Kebhinnekaan menjadi dasar berfikir mereka dalam menyikapi perbedaan agama di Madura. Para ulama itu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan beragama yang dibenarkan dalam bingkai

NKRI, sehingga menjaga dan memelihara keragaman beragama menjadi tugas bersama untuk dijaga. Kiai Hasan (atau kalangan santri biasa memanggil Ra Hasan), salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Bata-Bata Pamekasan, juga membenarkan adanya kebebasan beragama dalam wadah NKRI yang telah memberikan jaminan keamanan dalam membumikan kebebasan dalam menjalankan agama yan diyakini oleh warganya. Menurutnya bahwa semuanya dalam bingkai NKRI. Perbedaan apapun yang terjadi, konteksnya mereka tetap dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan NKRI.

NKRI yang menjadi dasar pemikiran, secara otomatis telah memberikan gambaran tentang cara pandang para ulama Madura bahwa konsep final NKRI dianggap sebaga pilihan tepat, karena prinsip yang dibangun dalam NKRI adalah keragaman dalam semua aspek. Semua perbedaan yang menyatu dalam wadah NKRI ibarat telah menjadi satu tubuh, yang tidak terpisahkan, termasuk di dalamnya perbedaan dalam beragama. Kebebasan beragama dalam bingkaua NKRI yang menjadi dasar berfikir para ulama di Madura, secara substansial memberikan isyarat tentang sikap dan respon positif ulama dalam memaknai hubungan agama dengan konsep bernegara NKRI. Artinya, perbedaan agama yang terjadi di Madura, sejatinya ditempatkan sebagai bagian dari khazanah nusantara yang dibenarkan dan dilindungi oleh negara, sehingga penghormatan dan toleransi terhadap keragaman agama menjadi sesuatu yang *given*. Para ulama menerima setiap perbedaan agama di Madura, sebagai konsekwensi dari komitmen menjunjung tinggi konsep negara dalam bingkai NKRI.

NKRI merupakan refleksi dari negara yang memiliki ciri khas keragaman (pluralitas) yang kuat. Pluralitas itu pada gilirannya diikat oleh satu kekuatan bernama NKRI dan Pancasila sebagai ideologi di dalamnya. Ketika para ulama Madura menyatakan NKRI sudah final, maka keragaman juga sudah bisa dipastikan telah dianggap final, sehingga tak perlu dipersoalkan. Bahkan, wajib diterima apa adanya, dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk saling menyakiti dan menafikan. Menempatkan kebebasan beragama, dalam bingkai NKRI merupakan bentuk pengakuan yang tulus kalangan ulama dalam menerima konsep NKRI secara *kaffah.* Dengan mematok NKRI sebagai pondasi dalam membangun kebebasan beragama di Madura, sudah pasti akan memberikan keyakinan tentang tumbuhnya toleransi dan kerukunan yang harus dibanguan. Karena dalam kebebasan beragama, setiap orang di Madura memiliki hak yang sangat azazi untuk menentukan keyakinan sendiri, tanpa merasa terancam dan ketakutan dari pihak manapun. Sebagimana komitmen ulama terhadap NKRI, komitmen ulama dalam menjaga kebebasan beragama dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Undang-Undang menjadi komitmen para ulama Madura.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah *Pertama*, sebagai sumbangan pemikiran tentang masalah gerakan dan pemikiran Kiai Madura terhadap peradaban bangsa ini, sehingga gerakan kiai BASRA yang notabene menjadi elit sosial religus di Madura dengan peran-peran strategisnya dalam pembangunan Madura bisa terbaca secara ilmiah. *Kedua,* sumbangan dan gambaran yang utuh tentang pemikiran Kiai BASRA terkait dengan masalah kebebasan agama di Madura, serta masa depan

pengembangan hubungan antara agama di Madura, terutama dalam menyongsong Madura sebagai Serambi Madinah. *Ketiga*, dokumen secara ilmiah pemikiran-pemikiran kiai di kalangan BASRA secara utuh, terutama pemikiran tentang masalah pengembangan keberagamaan di Madura, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu acuan di era multikulturalisme agama yang merambah berbagai pelosok dunia secara umum, dan Madura secara khusus.

Sumenep, 12 Januari 2018

Kata Pengantar

Rasa puja dan puji syukur al-Hamdulillah kami haturkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahNya kepada kita semua. Shalawat dan salam kami haturkan kepada bapak revolusioner Islam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada agama yang diridhai-Nya *Radhitu bilahi Rabban wabil Islama Dinan*.

Pertama ucapan terima kasih kepada civitas akademika STKIP PGRI Sumenep melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, motivasidan berbagai catatan evaluasi untuk diper-baiki demi peningkatan kualitas peneliti terhadap kami para peneliti pemula dan dengan menfasilitasi semua proses sampai ahir dari penelitian ini.

Kedua Direktorat riset dan pengabdian masyarakat Dirjen penguatan riset dan pengembangan Kemristek DIKTI yang selalu mengevaluasi dan juga telah memberikan kesempatan pada para

peneliti muda untuk melakukan penelitian sebagai salah satu bagian dari tri darma perguruan tinggi yang merupakan langkah awal agar lebih paham tentang berbagai seluk-beluk penelitian agar bisa naik ke jenjang penelitian berikutnya agar kemajuan Indonesia terus bisa dikawal.

Selanjutnya sebagai pengantar awal dari hasil riset ini adalah viralnya interpretasi secara harfiah dan berbagai sikap keberagamaan yang keliru muncul dari penafsiran dan pemahaman terhadap agama yang keliru. Kita selalu menganggap bahwa Islam adalah agama perdamaian, agama yang menebarkan kasih-sayang bagi siapa saja, agama yang memiliki Tuhan dengan sifat rahman dan rahim, tapi sayangnya, pada saat yang sama, kita menampakkan wajah Islam yang angker, yang keras, yang berdarah-darah, seolah kita ingin membenarkan tuduhan media Barat selama ini bahwa Islam identik dengan terorisme, bahwa Islam identik dengan kekerasan. Tentu ada banyak faktor yang memicu dan melatar belakangi terjadinya konflik internal umat Islam tersebut. Salah satunya adalah soal teologis. Umum diketahui bahwa pertengkaran semacam itu dipicu oleh adanya perbedaan di dalam menafsirkan Islam.

Perbedaan berupa pro dan kontra dari tafsir itu sering tidak dimaknai sebagai rahmat yang harus dinikmati, melainkan sebagai laknat yang harus dijauhi. Setiap kelompok dalam Islam selalu berpendirian adanya kebenaran tafsir tunggal, seperti yang dirumuskan oleh dirinya sendiri. Sementara tafsir orang lain diposisikan sebagai berada dalam kesesatan yang terang-benderang. Dengan ini, maka yang terjadi sejumlah ketegangan di internal umat Islam. Antara Sunni dan Syi'ah. Antara Sunni dan Mu'tazilah. Antara Sunni dan Ahmadiyah. Bahkan, di internal Sunni pun sering terjadi perang dingin. Di Indonesia pernah terjadi hubungan tak harmonis antara Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah karena hal-hal yang sebenarnya sangat remeh-temeh. Namun, alhamdulillah, hubungan

tak harmonis antara dua ormas keislaman besar itu tak berujung pada penghancuran, satu dengan yang lain. Maka, Badan silaturahim ulam Madura (BASRA) merupakan wadah yang penting dalam menjadi marwah ulama dan eksistens Islam yang sering disudutkan oleh berbagai pihak seperti tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme.

Maka, buku ini bertujuan merajut peran para ulama dalam kebergamaan, bangsa kita secara spesifik Madura jangan menjadi mundur dengan tujuan kedamaian para ulama BASRA sesuai cita-cita luhur piagam Madinah yang dicita-citakan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan lebih-lebih bagi teman-teman Pembaca umumnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita akan studi Islam. Semoga apa yang kita ijtihadkan bersama diterima disisi-Nya, Amien.

Peneliti

Membaca Madura Bersama Ulama Basra
(Upaya mengurai Benang Kusut Keberagaman dan Keberagamaan)

Eksistensi para Ulama mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan peran yang maha penting dalam kehidupan umat baik dalam beragama berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, peran itu berupa tugas pencerahan bagi umat manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai para pewaris Nabi (*waratsatul anbiya'*) meminjam istilah Clifford Geertz-perantara dan pialang budaya (*cultural broker*). Sebagai seorang pialang budaya, ulama' berfungsi untuk menghubungkan budaya lokal atau rakyat dengan budaya asing guna lebih memudahkan pemahaman rakyat tentang berbagai hal dalam kehidupan Indonesia yang yang plural dan begitu majemuk baik secara etnis, suku ras dan berbagai buadaya yang kaya akan berbagai ragam kebinnikaan, termasuk Madura yang kaya dengan berbagai pitutur bahasa dan adat istiadat ketimuran yang terkenal dengan istilah *bhupa' bhaphu' ghuru rato* (orang tua, guru dan penguasa) adalah simbol orang-orang yang ditaati dan dimuliakan. Terlebih pada ulama yang menjadi guru dan panutan dalam hal keagamaan.

Negara Indonesia yang mengakui 6 agama dan menjamin kebebasan tersebut terdapat dalam UU yang sudah dijamin kebebasan dalam beragama dan melaksanakan ibadah sesuai keyakinanmya. Maka dari itu, kita sebagai warga Negara yang baik dan patuh serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian yang dicita-citakan kita semua. Bebicara tentang kebebasan kita harus mencoba untuk membangun toleransi antar umat beragama dan kebebasan beragama. Kerukunan berdampak pada toleransi yang matang, atau sebaliknya toleransi antar pemeluk agama dapat menghasilkan kerukunan antar sesama pemeluk agama, keduanya saling mempunyai hubungan horizontal dan vertikal yakni terhadap sesama manusia sebagai makhluk dan sekaligus hamba Allah.

Adanya tri kerukunan antar umat beragama, intern umat seagama, dan umat beragama dengan pemerintah terbangun serta diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, maka akan muncul toleransi antar umat beragama. Jika toleransi antar umat beragama dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan masyarakat yang rukun satu sama lain. Adanya toleransi antar umat beragama harus tercermin pada tindakan-tindakan nayata atau perbuatan yang menunjukkan umat saling menghargai, menghormati, menolong, mengasihi, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya menghormati agama dan iman orang lain; menghormati ibadah yang dijalankan oleh orang lain; tidak merusak tempat ibadah; tidak menghina ajaran agama orang lain; serta memberi kesempatan kepada pemeluk agama menjalankan ibadahnya. Di samping itu, maka agama-agama akan mampu untuk melayani dan menjalankan misi keagamaan dengan baik sehingga terciptanya suasana rukun dalam hidup dan kehidupan masyarakat serta bangsa. Perbedaan yang muncul dari warna kulit, bahasa, agama, budaya, dan bangsa merupakan sunnatullah. Tuhan mendesain perbedaan diantara umat manusia dengan tujuan agar

hamba-hambanya bisa saling mengenal. Bukan untuk saling mengklaim siapa yang lebih tinggi dari yang lain, bukan pula saling bermusuhan apalagi berperang.

Buku tentang **Madura Serambi Madinah; Potret Kebebasan Beragama di Madura Perspektif Ulama BASRA** yang ditulis saudara Mukhlishi, adalah upaya mengungkapkan peran ulama sebagai pembimbing umat di mana dalam buku ini terfokus pada ulama Madura yang tergabung dalam paguyuban Badan Silaturrahim Ulama Madura (BASRA), hal ini penting karena peran ulama sebagai wadah para ulama dalam mersespons persoalan masyakat, terutama Madura yang ingin memanifestasikan sebagai serambi Madinah dengan melihat pada sejarah Nabi Muahammad SAW yang membangun Negara Madinah.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan koleksi keilmuan terlebih penting mengetahui dan memehami dalam melihat peran ulama sekaligus hadirnya buku ini dapat menjadi pijakan dan tamabahan referensi yang lebih komperhensip dalam memahami peran ulama dalam hal ini ulama yang tergabung dalam BASRA yang proaktif dalam mersepons persoalan masyarakat Madura.

Selamat membaca. Semoga bermanfaat

Dr. Asmoni, M.Pd
Ketua STKIP PGRI Sumenep

Daftar Isi

Pengantar Penulis iii
Kata Pengantar..... xi
Membaca Madura Bersama Ulama Basra
(Upaya mengurai Benang Kusut Keberagaman dan
Keberagamaan) xv
Daftar Isi xix

Bab I
Bagian Awal 1
A. Pendahuluan 1
B. Kajian Dan Tujuan Tentang Keberadaan Basra 5
C. Signifikansi Kajian Tentang Basra 6
D. Metodologi Penelitian 6

Bab II
BAGIAN KAJIAN
GENEOLOGI KEMUNCULAN BASRA 9
A. Cikal-Bakal berdirinya Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASRA) 9
B. Persepsi Ulama BASRA tentang Persoalan umat 11
C. Persepsi Ulama BASRA tentang Kebebesan beragama 13
D. Kebebasan Beragama Secara Konseptual 15

Bab III
BAGIAN INTI
KEBEBASAN BERAGAMA AGAMA PERSPEKTIF ULAMA BASRA 23
A. BASRA dalam Dinamika Sosial Masyarakat Madura 23
B. Kebebasan Beragama dan Argumen Kebangsaan Ulama "Dalam Bingkai NKRI" 28
C. Respon Ulama atas Percikan Konflik Agama "Syiah-Sunni Sampang" 37
D. Kebebasan Agama Dengan Spirit Piagam Madinah 39

Bab IV
BAGIAN AHIR
PENUTUP 49
A. Kesimpulan 49
B. Rekomendasi dan Saran 50

Daftar Pustaka 53
Curriculum Vitae 57

Bab I
Bagian Awal

A. Pendahuluan

Konstelasi kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia, Madura dengan segala potensi yang dimiliki di dalamnya selalu melahirkan wacana-wacana krusial yang cukup unik, mulai wacana menjadi propinsi sendiri sampai pada pemikiran menjadikan Madura sebagai serambi Madinah. Semua itu merupakan dinamika sosial yang terus berkembang di pulau seribu pesantren ini.

Gagasan menjadikan Madura sebagai serambi Madinah merupakan pemikiran unik yang pernah dimunculkan di Madura dan bahkan akan terus digulirkan guna menciptakan kondisi Madura yang tetap berpijak pada nilai-nilai ke-Madinah-an, yaitu satu model kehidupan yang berpijak pada kerangka nilai-nilai agama yang kuat dengan merujuk pada ajaran al-Qur'an dan Hadith Nabi Muhammad SAW.

Dalam aspek keagamaan, Madura didominasi oleh kalangan Muslim tulen yang menguasai di seluruh Madura (baik di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep).[1] Kemunculan isu-isu dan simbol keagamaan dalam ranah sosial kehidupan Madura merupakan akibat dari hal itu, seperti diungkapkan Abd. A'la, bahwa potret masyarakat Madura sebagai masyarakat dengan keberagamaan yang kuat, tapi sekaligus "dianggap" nyaris lekat dengan tradisi atau budaya yang tidak selamanya mencerminkan nilai-nilai Islam mengisyaratkan tentang kompleksitas kehidupan budaya keagamaan masyarakat Madura itu sendiri.[2]

Simbolisasi komitmen keagamaan itu, salah satunya tergambar dalam rumah-rumah tradisional masyarakat Madura, baik di Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan, yaitu dalam setiap rumah pasti memiliki sebuah bangunan *langgher* (mushalla) dengan lokasi berada di ujung paling barat sesuai dengan simbolisasi posisi Ka'bah sebagai simbol kiblat umat Islam.[3]

Tigginya komitmen keagamaan orang Madura biasanya dikongkritkan dengan memberikan kepercayaan sosial yang tinggi terhadap elite-elite agama (kiai/ulama) Madura. Bagi rata-rata orang Madura, kiai/ulama adalah panutan dan pegangan

[1] Tingginya apresiasi masyarakat Madura dalam beragama, bisa dilihat betapa antusiasnya masyarakat Madura memakmurkan masjid, mushalla dan langgar yang bertebaran di seluruh penjuru Madura. Kenyataan menunjukkan tentang posisi agama Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Madura. Lihat. KH. Mohammad Tidjani Djauhari, *Membangun Madura* (Jakarta : TAJ Publishing, 2008), hlm. 2.

[2] Lihat. Pengantar Abd. A'la, *"Membaca Keberagamaan Masyarakat Madura"*, dalam Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2004), hlm. v

[3] A. Latif Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogjakarta : LKiS, 2006), hlm. 46

dalam menjalani serta menentukan kehidupan sosial, sehingga dalam ranah sosial, kiai memiliki peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat dan masa depan Madura.

Zamakhsyari Dhofirdalam Faisal menyebutkan bahwa sosok kiai merupakan tokoh sentral dalam kehidupan sebuah pesantren. Dengan integritas kepribadian, wibawa keilmuan dan kharisma kepemimpinannya, seorang kiai menjadi anutan bagi seluruh anggota keluarga, bagi para santri dan bagi komunitas di lingkungan dan di luar pesantrennya.[4] Kiai adalah *uswatun hasanah*, contoh dan model yang baik dalam seluruh perilaku, tindak tanduk, perangai dan tabiat pribadinya bagi para santri dan komunitas di lingkungannya. Pengaruh kiai terasa tidak saja dalam kehidupan sosial keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial politik.[5]

Oleh karena itu, posisi Kiai di tengah-tengah masyarakat Madura kerapkali diposisikan lebih tinggi dari pada posisi sosial apapun, bahkan dalam derajat tertentu Kiai terposisikan sebagai penguasa sosial dan rujukan yang esensial dalam memetakan dan mengarahkan masa depan pembangunan Madura yang dianggap mampu menggerakkan masyarakat secara kultural, apalagi elit-elit melebur dalam satu komunitas kultural yang kuat, seperti BASRA (Badan Silaturrahim Ulama Madura).

Sebagai komunitas yang mewadahi para kiai Madura, BASRA acapkali menjadi gawang dan penentu tentang masa depan Madura. Gagasan dan gerakan sosial yang dilakukan BASRA secara langsung dianggap sebagai representasi masyarakat Madura, sehingga berbagai gagasan tentang Madura

[4] Faisal Ismail, dkk, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai* (Yogjakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm. 21

[5] *Ibid*, hlm. 21

yang diusung oleh kiai-kiai BASRA juga menjadi kesepakatan masyarakat. Salah satu gagasan besar tentang pembangunan Madura yang hendak diperjuangkan oleh BASRA adalah menciptakan kehidupan Madura yang tetap kental dengan nilai-nilai religiusitasnya.

Secara otomatis, nilai-nilai keislaman akan menjadi nuansa kental dalam pembangunan Madura, karena BASRA merupakan wadah para elit-elit agama Islam, sehingga tidak mustahil dalam setiap gagasan dan gerakan yang ditawarkan akan menimbulkan sesuatu yang bias, terutama terhadap penganut agama lain, apalagi BASRA hanya mewadahi satu elit agama (Islam) dan tidak mengakomodir elite agama yang lain. Padahal, pembangunan dan pengembangan Madura harus didasarkan pada pemikiran semua pihak, tidak hanya didominasi oleh pemikiran pihak dominan, tetapi juga elit-elit agama lain, sehingga akan terjadi sinergi yang ideal dalam membangun Madura, terutama dalam masalah kebebasan beragama dan perlindungan terhadap agama lain.

Dalam konteks ini, gagasan kiai BASRA tentang kebebasan agama di Madura menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diangkat ke permukaan, sehingga gerakan dan pemikiran kiai-kiai BASRA tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi agama lain, karena secara teoritis, pihak dominan acapkali menafikan keberadaan pihak minoritas, sehingga pemikiran tentang masalah kebebasan agama yang menjadi cita-cita BASRA di Madura merupakan sesuatu yang faktual untuk ditransformasi di tengah wacana menjadikan Madura sebagai serambi Madinah, peta dan formulasi pemikiran tentang kebebasan agama yang ditawarkan oleh para kiai Madura dapat menjadi spektrum

dalam membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat Madura yang universal dan plural.

B. Kajian Dan Tujuan Tentang Keberadaan Basra

Dari gambaran di atas, penulis dalam mengajukan beberapa rumusan masalah : 1) Bagaimana peran strategis BASRA sebagai kekuatan elit sosial relegius dalam konstelasi gerakan sosial budaya di Madura? 2) Bagaimana pandangan kiai-kiai yang tergabung dalam BASRA tentang perbedaan agama di Madura? 3) Bagaimana pemikiran kiai-kiai BASRA dalam memposisikan kelompok penganut agama lain di tengah wacana membangunan Madura sebagai serambi Madinah?

Tujuan dalam sebuah penelitian menjadi bagian integral dari proses penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan yang signifikan : 1) Untuk memperoleh gambaran secara detail tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh BASRA dalam proses sosial (terutama sosial agama) yang terjadi di Madura, dimana BASRA telah menjadi *icon* kultural religius yang dikomandani oleh para kiai kharismatis untuk menciptakan kehidupan Madura yang sejahtera dan islami. 2) Secara obyektif untuk menggambarkan tentang penafsiran (pemikiran) kiai-kiai BASRA berkaitan dengan kebebasan agama dan posisi penganut agama lain dalam proses pembangunan Madura di tengah wacana menyiapkan Madura sebagai Serambi Madinah.

Adapun ruang lingkup kajian ini adalah gerakan sosial keagamaan yang telah dilakukan oleh BASRA di Madura, yang secara spesifik akan lebih difokuskan lagi pada masalah pemikiran (penafsiran) para kiai yang tergabung dalam BASRA

tentang masalah perbedaan (kebebasan) agama dan posisi penganut agama lain dalam dinamika pembangunan sosial di Madura.

C. Signifikansi Kajian Tentang Basra

Sebagai salah satu kegiatan ilmiah, penelitian ini memiliki beberapa signifikansi yang sangat mendasar. *Pertama*, untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang masalah gerakan dan pemikiran Kiai Madura terhadap peradaban bangsa ini, sehingga gerakan kiai BASRA yang notabene menjadi elit sosial religus di Madura dengan peran-peran strategisnya dalam pembangunan Madura bisa terbaca secara ilmiah

Kedua, untuk memberikan sumbangan dan gambaran yang utuh tentang pemikiran Kiai BASRA terkait dengan masalah kebebasan agama di Madura, serta masa depan pengembangan hubungan antara agama di Madura, terutama dalam menyongsong Madura sebagai Serambi Madinah.

Ketiga, mendokumentasikan secara ilmiah pemikiran-pemikiran kiai di kalangan BASRA secara utuh, terutama pemikiran tentang masalah pengembangan keberagamaan di Madura, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu acuan di era multikulturalisme agama yang merambah berbagai pelosok dunia secara umum, dan Madura secara khusus.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan. Karena penelitian ini mencoba menggali data berupa kata-kata, untuk kemudian dianalisis secara obyektif dan mendalam. Adapun jenis data

yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dalam bentuk penafsiran dan pandangan kiai BASRA tentang kebebasan agama di Madura. Sementara data sekunder diambil dari beberapa dokumen, baik dalam bentuk buku maupun tulisan jurnal dan majalah yang terkait dengan judul yang dianggap relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

Mengacu pada pendekatan tersebut, maka metode pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu dengan beberapa bentuk. *Pertama*, observasi lapangan. *Kedua*, wawancara mendalam (*dept interview*). Teknik wawancara merupakan teknik kunci dalam penelitian ini, karena penelitian akan lebih difokuskan pada pandangan atau penafsiran kiai Madura terhadap kebebasan agama di Madura, sehingga wawancara mendalam dengan beberapa narasumber menjadi sesuatu yang sangat signifikan dalam proses pengumpulan data. *Ketiga*, dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan teks-teks tertulis lainnya.[6]

Adapun lokasi penelitian ini ialah Madura yang difokuskan pada kiai yang tergabung dalam BASRA (Badan Silaturrahim Ulama Madura), baik yang ada di Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan). Sementara karakteristik informan yang akan dipakai ialah. *Pertama*, kiai-kiai yang secara struktural berada dalam struktur BASRA. *Kedua*, kiai yang memiliki

[6] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

hubungan dengan BASRA, yaitu kiai yang terlibat di BASRA sebagai anggota

Untuk melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, akan digunakan dua teknik, yaitu : *Pertama*, *Conten analysis* (analisis isi), sekaligus bersifat deskriptif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif.[7] Teknik ini digunakan untuk menganalisis penafsiran objek kajian, sehingga dapat diketahui inti dan paradigma penafsiran yang dipakai oleh objek kajian. *Kedua*, *Critical discourse analysis* (analisis wacana kritis). Teknik ini digunakan sebagai salah satu upaya untuk menelaah secara kritis penafsiran kiai BASRA tentang masalah kebbasan agama di Madura. Wacana disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa, tetapi analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis disini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Dalam kajian ini, bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.[8]

[7] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogjakarta : LKiS, 2004), hlm. 13

[8] Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisi Teks Media* (Yogjakarta : LKiS, 2005), hlm. 7

Bab II
BAGIAN KAJIAN
GENEOLOGI KEMUNCULAN BASRA

A. Cikal-Bakal berdirinya Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASRA)

Kiai-kiai sepuh Madura seperti kiai Abdulah Cholil Bangkalan, kiai Tidjani Djauhari Sumenep, kiai Muhammad Rofii Baidlowi Pamekasan, kiai Dhafir Syah Sampang sering bertemu dan bersila–turrahmi. Dari pertemuan ini tercetuslah ide untuk membentuk forum silaturrahmi antara ulama yang diberi nama Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASRA) pada tahun 1991. Adapun deklarasi BASRA pada tanggal 1 November 1992 bertepatan tanggal 5 Jumadil akhir 1413 H. di pondok pesantren al-Amin parenduan.[1]

Tujuan didirikannya BASRA bukan semata-mata karena jem–batan Suramadu akan dibangun, namun karena beberapa faktor salah satunya adalah pertama, memupuk ukhuwah di

[1] Iwan Kuswandi, *Ulama Negosiator Pesantren; Teladan dan Pengaman Hidup KH. Moh. Tidjani* (Yogyakarta: Pondok Mas, 2011), hlm. 104.

kalangan pesantren, terutama pesantren yang diasuh kiai-kiai NU Nahdlatul Ulama) dan SI (Syarikat Islam). Sebagaimana dimaklumi bahwa di Madura terdapat banyak pondok pesantren, baik yang besar (jumlah santri di atas dua ribu orang), menengah (jumlah santri seribu sampai dua ribu orang), maupun kecil (jumlah santri kurang dari seribu orang). Jumlah pondok yang banyak, memang merupakan modal sosial yang amat berharga, namun jka tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pemicu konflik horizontal, sekurang-kurangnya terjadi persaingan yang tidak sehat di antara sesama pengelola pondok pesantren. Oleh karena itu, memupuk ukhuwah di kalangan pondok pesantren adalah sebuah keniscayaan. Di samping ajang *sharing* dan berbagi pengalaman.[2]

Banyak dari berbagai tugas ulama sekarang adalah memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang terdapat di dal;am kitab kuning untuk segera diantisipasi. Kelemahan-kelemahan itu makin memperkuat suatu pandangan bahwa kitab kuning sama sekali tidaklah suci atau sakral. Kitab kuning bisa dipelajari, dikaji, dikoreksi, digugat, dan direkonstruksi terkait dengan kelemahan–kelemahanya.[3]

BASRA adalah paguyuban yang tidak ada pengurusnya; artinya tidak ada ketua maupun anggota. BASRA hanyalah ajang silaturrahim antar kiai atau ulama yang ada di Madura. Keberadaannyapun bersifat informal. Namun demikian, untuk memudahkan koordinasi, di setiap kabupaten diangkat koordinator yang dipilih oleh kiai-kiai atau ulama yang sering

[2] Abdullah Sattar, Badan Silaturrahmi Ulama Madura; Da'wah multi fungsi, Jurnal, *Komunikasi Islam*, vol. 4 nomor 2, 2014. Hlm. 224.

[3] Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Instritusi*, (Jakarta; Erlangga, 2008), hlm 128.

bertemu. Sedang untuk kepentingan administrasi (terutama jika ada momen atau event yang berskala nasional) ditunjuk koordinatot pusat dan sekretaris di tingkat Madura.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tugas ulama adalah memberikan solusi terkait persoalan kehidupan yang dihadapi umatnya. Ketika nasyarakat Madura resah dengan rencana pembangunan jembatan Suramadu dan industrialisasi di Madura yang dikuatirkan akan berdampak tergerusnya nilai-nilai religious dan moral dari kehidupan mereka, para ulama Madura sering mengadakan silaturrahim di antara mereka. Memang, silaturrahin mereka tidak semata-mata persoalan jembatan Suramadu, namun jembatan Suramadu dan rencana industrialisasi di Madura menjadi magnet tersendiri.[4]

Selain itu ulama BASRA juga menegaskan bahwa proses pembangunan dan pengembangan Madura harus dilakukan secara bertahap degan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat Madura supaya tidak terkesan dipaksanakn. Hal ini kiranya merupakan pertimbangan yang realistis mengingat kualitas SDM di Madura masih rendah. Sehingga merupakan kekhawatiaran bila nantinya yang menjadi pengelola justru tenaga dari luar Madura. Maka, apabila itu yang terjadi, tentu akan berdampak pada marjinalisasi masyarakat Madura sendiri.

B. Persepsi Ulama BASRA tentang Persoalan umat

Ulama BASRA menyerukan akan pentingnya peningkatan integrasi umat serta peran ulama. Sehingga nantinya bisa mewarnai kebijakan pebangaunan nasional agar menimal tidak bertentangan dengan bilai-nilai ajaran islam. Terkait maslah

[4] Sattar, *Badan.*,hlm. 223.

industri parawisata di Madura, ulama BASRA berpendapat agar diarahkan pada pebangunan industri parawisata yang relevan dengan budaya lokal Madura yang Islami.[5]

Sebagai pengawal nilai-nilai religi dan moral masyarakat Madura, ulama BASRA sering berhadapan dengan pihak-pihak yang dianggap telah keluar dari jalur mainstream ajaran Islam Madura, setidak-tidak nya telah menyimpang. Pengaduan dan informasi dari masyarakat terkait aktifitas keagamaan yang dianggap menyimpang direspon dan ditindaklanjuti oleh BASRA. Begitu pun jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak selaras dan senafas dengan nilai-nilai Islam, BASRA pun akan melakukan *action*.

Salah satunya ulama' BASRA menyikapi persoalan sosial kemasyarakatan kekinian seperti pernikahan antar agama, Sebagai wadah perkumpulan ulama yang mempunyai tugas mencerahkan mayarakat, maka BASRA berusaha menginvetarisir berbagai problematika yang dihadapi masyarakat, terutama menyangkut term-term keagamaan dicoba didiskusikan dan dicarikan solusinya agar masyarakat bisa damai dan tentram. Dewasa ini, harapan formal terhadap agama dan umat beragama terutama adalah "mengatasi dampak dan ekses modernisasi". Di sini, modernisasi dianggap sebagai keharusan, tanpa banyak dinilai apa hakikatnya dan bagaimana kejadian aktualnya, sedangkan umat ber–agama diharapkan peranannya sebagai "tukang sapu jalanan". Malah kepada umat beragama diharapkan untuk dapat "menyesuaikan diri" terhadap proses modernisasi. Di sini, agama ditempatkan pada posisi

[5] Iwan Kuswandi dan Abdul Wahid Hasyim, *Mengenal Kiai Tidjani*, (Surabaya: Qawiyyul Amin, 2007), hlm. 71.

yang defensif, yaitu harus bisa melayani tujuan dan cara-cara modernisasi. Apabila agama tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak bisa berfungsi efektif dalam mengatasi dampak dan ekses modernisasi, maka agama diperkirakan akan tidak lagi relevan dan harus ditinggalkan.[6]

C. Persepsi Ulama BASRA tentang Kebebesan beragama

Persinggungan masyarakat Indonesia yang beragam dewasa ini, harapan formal terhadap agama dan umat beragama terutama adalah "mengatasi dampak dan ekses modernisasi". Di sini, modernisasi dianggap sebagai keharusan, tanpa banyak dinilai apa hakikatnya dan bagaimana kejadian aktualnya, sedangkan umat ber–agama diharapkan peranannya sebagai "tukang sapu jalanan". Malah kepada umat beragama diharapkan untuk dapat "menyesuaikan diri" terhadap proses modernisasi. Di sini, agama ditempatkan pada posisi yang defensif, yaitu harus bisa melayani tujuan dan cara-cara moderni–sasi. Apabila agama tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak bisa berfungsi efektif dalam mengatasi dampak dan ekses modernisasi, maka agama diperkirakan akan tidak lagi relevan dan harus ditinggalkan.[7]

Pada sisi lain, gempuran budaya asing yang akan menggerus budaya lokal yang arif dan kaya nilai-nilai religi sangat dikuatir-kan. Budaya dan tradisi masyarakat Madura yang kental dengan nuansa keagamaan harus ekstra ketat dikawal. Budaya asing yang permisif dan bebas nilai tentu bertentangan dengan budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai keberagamaan. Belum lagi timbulnya paham indivi–dualistik yang secara diametral

[6] Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cenekiawan Muslim,* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 373-374.

[7] Ibid.,

bertentangan dengan budaya Madura yang guyub dan saling tolong menolong antar sesame sebagai identitas masyrakat Indonesia yang mempunyai jiwa dan rasa tolong menolong yang sangat tinggi.

Salah satu Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASRA) tentang merespons kebebasan pernah melakukan Sabtu (14/4) sore, mengadakan pertemuan dengan dua anggota Komisi VIII DPR-RI asal Daerah pemilihan Madura masing-masing Ach Ruba'i dan Said Abdullah di ruang pertemuan Islamic Center Pamekasan. Pertemuan itu dalam rangka menyikapi lima rekomendasi Komnas HAM yang dinilai sembarangan, anti agama dan dapat menghancurkan sendi-sendi beragama, khususnya Ummat Islam di Indonesia. Lima rekomendasi itu diantaranya, Menghapus aturan tentang tidak sahnya pernikahan beda agama, menghapus pencantuman agama dalam berbagai dokumen kependudukan, menghapus pasal perlindungan dan penodaan agama, menghapus SKB 2 menteri tentang pendirian rumah ibadah dan menghapus hak peserta didik dalam mendapatkan pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya. BASRA melalui KH Nuruddin A. Rahman dari Bangkalan bahkan mengusulkan, agar Komnas HAM dibubarkan saja apabila memaksakan rekomendasi tersebut untuk tetap digunakan dalam pengayaan Pansus Kerukunan Ummat Beragama (KBM: online).

Terminologi kiai sebagai tokoh agama menjadi rujukan berbagai masalah termasuk didalamnya masalah kebebasan beragama di mana posisi kiai atau ulama' "sesuatu yang dianggap memiliki harkat dan dituakan". Makna ini diadopsi ke dalam medan semantik ulama, yang berarti orang berilmu

dan merupakan pewaris Nabi. Peran kiai menjadi sentral di tubuh NU, mengingat Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama. Hal tentu merupakan angin segar kebangkitan ulama' dalam mengayomi umat, terlebih di era digital yang banyak saling serang dengan menggunakan label SARA, padahal NKRI sudah final yang berarti harus berpikiran Maju yang telah bersepakat kita hidup dalam keberagaman yang itu juga pernah dipraktekkan nabi dalam piagam Madinah sehingga Negara Madinah yang beliau pimpin mampu menganyomi kaum minoritas seperti Yahudi dan Nasrani.

Ulama Madura yang tergabung dalam BASRA mencoba untuk mentransformasikan ajaran Islam terutama terkait dengan kebebasan dari yang bersifat normatif menjadi praksis. Untuk kepentingan ini, model pemahaman yang dilakukan variatif, mulai dari pemahman kultural dengan masyarakat umum, hingga pemahamn yang terkatagori struktural yakni selektif dan mengkritisi serta mengkaji kebijakan pemerintah yang dapat mengikis budaya Indonesia secara umum dan Madura secara khusus.

D. Kebebasan Beragama Secara Konseptual

Kebebasan dalam menganut agama merupakan hak setiap manusia. Memilih agama sesuai dengan keyakinan yang hakiki merupakan fitrah kehidupan manusia. Tak ada manusia manapun yang bisa membatasi ruang keyakinan seseorang, karena memilih keyakinan merupakan wilayah yang prifat. Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang sama, terutama dalam memilih agama yang diyakini bisa memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan, hak asasi manusia itupun sudah

mendapatkan legitimasi dari dunia internasional sebagaimana telah ditegasan oleh Alim (2001 : 60) dalam *Declaration of Independence of the United States of America,* yang dideklarasikan oleh *The Representatives of the United States of America* dalam General Congress Assembled, pada 4 Juli 1776.

Dalam konteks kebebasan tersebut, setidaknya terdapat empat macam kebebasan yang dimiliki oleh manusia, yang terkenal dengan *The Four Freedoms* yang dimiliki oleh manusia dan hal itu bersifat sangat privat. Kebebasan tersebut misalnya dalam bentuk kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari perasaan takut.

Dari sekian kebebasan tersebut, kebebasan dalam memilih agama juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebebasan yang menjadi hak setiap manusia. Sebagai bagian dari hak substansial setiap manusia, memilih agama tentu saja tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan keyakinan manapun. Agama menjadi setiap hak individu sesuai dengan keyakinannya yang sangat substansial. Maka, pemaksaan untuk menganut agama tertentu dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak kemanusiaan yang kejam. Bahkan, negara maupun institusi agama apapun, juga tidak bisa melakukan intervensi untuk memaksa pihak lain agar menganut agama tertentu. Mohamed Talbi dalam Kurzman menyatakan bahwa : Kebebasan agama saat ini telah mengakar dalam kehidupan sosial kita. Sejak Hak Asasi Manusia pada tahun 1945, konsep ini telah muncul sebagai bagian esensial dari hukum internasional. Lebih jauh, Talbi menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk berbeda, dan bahwa planet yang ada telah sedemikian kecil bagi ambisi-ambisi dan

mimpi-mimpi. Di dunia baru ini, dalam periodenya yang pesat, tidak ada lagi ruang bagi yang ekslusif. Keanekaragaman adalah hukum zaman.[8]

Maka, kebebasan dalam menjadikan agama tertentu sebagai pusat keyakinan, mutlak berada di tangan setiap manusia yang hakiki. Beragama adalah fitrah kehidupan dan memilih agama sesuai keyakinan juga fitrah setiap individu yang bebas. Bahkan, dalam konteks agama Islam, menganut agama tertentu sudah ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa *bagimu agamamu, dan bagiku adalah agamaku*.

Bahkan, arogansi dan pemaksaan dalam beragama, sama sekali tidak dibenarkan menurut al-Qur'an, karena dalam beragama tidak ada paksaan, karena beragama dilandasi oleh satu keyakinan personal yang substansial. Allah menegaskan dalam al-Qur'an :

> "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Qs. Al-Baqarah: 256) :

Ayat tersebut menjelaskan tentang penegasian terhadap perilaku beragama yang cenderung memaksa terhadap keyakinan pihak lain. Istilah pemaksaan yang digunakan oleh al-Qur'an dalam ayat di atas, semakin menegaskan tentang hak kebebasan setiap manusia dalam memilih dan meyakini agama

[8] Mohamed Talbi, *"Kebebasan Beragama"*, dalam Charles Kurzman (editor), *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta : Paramadina, 2003), hlm 232.

tertentu, termasuk dalam ber-Islam. Karena Islam sama sekali tidak membenarkan adanya pemaksaan terhadap penganut agama lain, Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan untuk mengganti agama tertentu, melainkan Islam menawarkan sebuah konsep keberagamaan yang damai dan memberikan keyakinan tentang kebenaran yang hakiki.

> Dari perspektif al-Qur'an, kita dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia berakar pada sifat natural manusia, dan hal ini disebabkan karena rencana dan ciptaan Tuhan. Jadi, landasan bagi semua hak asasi manusia adalah kebebasan agama.[9]

Islam telah memberikan pesan yang gamblang tentang keragaman ini. Bahwa pluralitas dalam kehidupan tidak bisa dibantah dengan logika apapun. Jadi, pluralitas dalam beragama menjadi sesuatu yang *given*, nyata dan apa adanya dalam kehidupan umat manusia dalam sepanjang sejarah. Menurut Said Aqil Siroj (2006 : 298) bahwa diantara ketentuan Tuhan atas manusia adalah bahwa jagad raya bersifat plural. Dari komunitas manusia saja, Tuhan menjadikan dalam berbagai etnis, bangsa, bahasa, status sosial, dan sebagainya. Lebih jauh Said Aqil Siroj menjelaskan bahwa paham kebangsaan tidak berlandaskan kepada ras tertentu, agama tertentu, juga bahasa tertentu. Paham kebangsaan terformulasikan di atas sendi-sendi keseriusan dan tekad komunitas manusia untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka.

Dalam konteks itu, perbedaan agama sejatinya harus ditempatkan dalam ruang lingkup pluralitas yang telah menjadi kodrat dalam kehidupan. Agama yang plural dianut oleh segenap umat manusia, menunjukkan tentang adanya kebebasan bagi

[9] *Ibid*, hlm 253

setiap individu untuk merayakan pluralitas keagamaan sebagai konsekwensi dari pluralitas kehidupan. Seperti yang ditulis oleh Ngainun Naim bahwa pluralitas merupakan realitas yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia hadir tanpa rekayasa sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak.[10]

Konsep kerukunan antar umat beragama pada dasarnya berangkat dari konsep kemajemukan dan keanekaragaman dalam hidup. Perbedaan dalam banyak aspek kehidupan merupakan fakta alamiah atau fitrah kehidupan yang tidak bisa dinafikan. Menemukan perbedaan dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang niscaya dan mustahil untuk dinafikan, sehingga pengingkaran terhadap perbedaan manusia dalam berbagai aspeknya bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap realitas kehidupan yang "sengaja" telah diciptakan oleh Tuhan.

Hal itu telah digambarkan secara detail dalam al-Qur'an (al-Hujurat [49] : 13) : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Alla ialah orang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Pandangan Said Aqil Siradj (2006:279-280) bahwa esensi firman Allah itu berlaku bagi semua agama di dunia, terutama agama monoteis (Yahudi, Kristen, dan Islam). Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghuchu, ataupun agama-agama lain, pada hakikatnya sama, yaitu mengakui adanya dzat yang menciptakan dunia dan seisinya. Dzat inilah yang

[10] Lihat Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam* Keragaman (Yogjakarta : Teras, 2011), hlm. 23

wajib disembah dan ditaati oleh semua orang tanpa pandang bulu, sehingga ketaatan seorang manusia berada di atas ras, golongan, status sosial, warna kulit, serta perbedaan-perbedaan lahiriyah lainnya.

Oleh karena itu, pandangan Dawam, (2002: 120) perbedaan dan pluralisme (terutama agama) yang ada di dunia ini, pada hakikatnya merupakan sesuatu yang pasti terjadi, sehingga diperlukan kearifan dan kesadaran maksimal untuk meresponnya. Sebab, perbedaan agama yang tercipta, sama sekali bukan merupakan sebuah persoalan yang konflik, yang pada gilirannya melahirkan disharmoni diantara umat beragama itu sendiri, karena perbedaan yang terjadi pada hakikatnya merupakan fitrah kehidupan yang dengan sengaja diciptakan oleh Tuhan. Erich Formm menyebut agama sebagai kecenderungan kodrati manusia dalam mencari keseimbangan dalam eksistensinya. Dalam pencariannya itu, manusia mencari yang ideal. Dari situlah ia membentuk sistem orientasinya dan pengabdiannya. Kecenderungan ini merupakan bagian yang instrinsik dalam eksistensi manusia.

Sementara itu, Muchit Muzadi dalam Ayu Sutarto, (2008 : 100) memberikan ulasan cukup panjang tentang pemahaman saling menghormati ini :

Saling mengenal (*lita'arafu)* berarti saling mengerti, saling menghormati, dan saling membantu. Di hadapan Allah, manusia dari kelompok etnik manapun adalah makhluk yang mulia, sebagaimana firman-Nya : *Sungguh, Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka (kami beri kemampuan dalam angkut mengangkut) di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan mereka*

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan (Qs. Al-Isra' : 70). Berangkat dari sikap *lita'arafu* itu,menurut Muchit Muzadi, "saling mengenal" dan *Karramna* "dijadikan makhluk terhormat" itu, Islam mengatur hubungan antar manusia untuk saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, dan saling menasehati. Manusia memiliki bermacam hubungan, baik hubungan darah, akidah, etnik, profesi maupun ideologis dengan manusia lain.

Semua pandangan tersebut, membuktikan bahwa Islam telah tegas menempatkan cita-cita kehidupan yang toleran dan terbangun di atas landasan kebebasan beragama yang kuat. Islam telah memberikan hak privat terhadap setiap individu untuk berkeyakinan, tanpa ada unsur paksaan. Kebebasan dalam memeluk agama telah diberikan secara mutlak sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Bahkan, Islam telah memberikan pondasi yang cukup kuat dalam membangun kehidupan umat manusia yang bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Amin Abdullah menulis bahwa : Dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara religius, sejak semula, memang telah dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus. Jika ada hambatan atau anomali-anomali di sana sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendiri yang bersifat intoleran dan ekslusif, tetapi lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis-ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat.[11]

[11] Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 75.

Bab III
BAGIAN INTI
KEBEBASAN BERAGAMA AGAMA PERSPEKTIF ULAMA BASRA

A. BASRA dalam Dinamika Sosial Masyarakat Madura

Kiai atau ulama adalah sosok sentral dalam kehidupan umat Islam. Keberadaan kiai menempati pada posisi yang sangat strategis dalam dinamika sosial masyarakat, bahkan kiai kerapkali disebut sebagai pelaku sosial yang cukup urgen dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat dengan komunitas pesantren yang besar. Posisi sentral tersebut terkait dengan kedudukan kiai sebagai orang yang terdidik dan kaya di tengah masyarakat.[1]

Sebagai elit terdidik, kiai identik dengan sosok berpengatahun, terutama pengetahuan agama, dan pada akhirnya kiai dianggap sebagai pewaris para Nabi, dengan keyakinan bahwa kiai memiliki hak otoritas dalam hal-hal keagamaan dan masalah sosial. Posisi semacam ini, konsekwensi dari pengakuan kiai

[1] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogjakarta : LKiS, 2004), hlm. 1

sebagai figur terdidik. Sementara dengan kekayaan yang dimiliki, Kiai menjadi patron, kepada siapa banyak penduduk desa bergantung. Posisi sentral kiai dapat dilihat dalam pola patronase ini, terutama karena pola ini menghubungkan dan mengikat kiai dengan para santri atau siswanya.[2]

Dalam konteks ini, keberadaan kiai di tengah-tengah masyarakat sebagai figur sentral yang menjadi rujukan bagi setiap aspek kehidupan sosial masyarakat, bahkan tidak jarang setiap perilaku dan gagasan kiai dijadikan sebagai rujukan yang absolut di kalangan masyarakat tradisional. Kiai bukan hanya diposisikan sebagai figur sosial yang sentral, tetapi – kadang – lebih dari sekedar itu, yaitu munculnya keyakinan bahwa kiai sebagai pewaris para Nabi. Keyakinan ini pada gilirannya melahirkan posisi melampaui posisi kiai dalam ranah sosial budaya, karena keyakinan kiai sebagai pewaris para Nabi memunculkan keyakinan total bahwa kiai bagian penting dalam dunia kenabian.

Akibatnya, posisi kiai di tengah-tengah masyarakat kultural adalah sebagai figur utama yang menjadi kiblat dalam semua aspek kehidupan sosial, lebih-lebih terutama dalam aspek agama.[3] Bagi masyarakat kultural (Madura misalnya), perilaku, perbuatan dan dan perkataan kiai dianggap sebagai referensi yang tidak terbantahkan, sehingga menjadi sesuatu yang

[2] *Ibid*.,

[3] Menurut Dirdjosantoso bahwa posisi sentral kiai pesantren dalam konteks sosial keagamaan dan politik, secara historis sudah berlangsung sejak jaman kerajaan. Pengaruh besar dalam urusan politik dan kenegaraan kiai pesantren dapat ditelusuri adanya pemberlakuan desa perdikan bagi desa yang ditempati pesantren. Kondisi tersebut menunjukkan tentang posisi kiai pesantren sebagai kelompok elit mendapat pengakuan publik dan ini sekaligus sebagai bukti kiai pesantren memiliki peran strategis di masyarakat. Lihat dalam Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Yogjakarta : Pustaka pelajar, 2002), hlm. 30

sejatinya harus ditiru dan didengar.[4] Apalagi dalam kehidupan masyarakat kultural, kiai dianggap sebagai pemimpin non formal sekaligus berperan sebagai sosok pemimpin spritual, dan posisi mereka sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Akibatnya, perkataan kiai akan selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh para jamaah, komunitas (komonitas santri/alumni santri, *pen*.) dan massa yang dipimpinnya.[5]

Dalam keterkaitan itu, dalam ranah sosial budaya, kiai tidak saja tampil sebagai broker kebudayaan masyarakat, tetapi bisa menghegemoni kehidupan sosial masyarakat, karena keyakinan pada kiai sebagai figur sosial, acapkali melahirkan kepatuhan yang total kepada kiai yang dalam konteks wacana masyarakat Madura terkenal dengan istilah *sami'na atha'na*, sehingga keberadaan ulama yang tergabung dalam BASRA dapat dijadikan sebagai penentu dinamika pola keberagamaan masyarakat Madura dalam setiap waktu.

Dalam dinamika sosial masyarakat Madura, keberadaan BASRA telah memberikan yang cukup signifikan. Sebagai wadah para ulama, keberadaan BASRA telah meberikan posisi tawar dengan pihak lain ketika berkaitan dengan persoalan Madura. BASRA sebenarnya bukanlah organisasi formal sebagaimana organisasi pada umumnya, melainkan hanya semacam paguyuban yang menjadi tempat silaturrahim para kiai dan ulama pesantren di Madura., sehingga sampai saat ini BASRA belum memiliki AD/ART. Oleh para ulama, kemudian BASRA menjadi tempat untuk membahas masalah-masalah

[4] Faisal Ismail, dkk, *NU, Gusdurisme*, hlm. 39
[5] *Ibid*., 39-41

yang berkembang di Madura, baik persoalan agama maupun masalah sosial lainnya.[6]

Kehadiran BASRA dalam dinamika sosial masyarakat Madura, merupakan wadah perjuangan para ulama se-Madura. BASRA dibentuk untuk membangun kekompakan para kiai, terutama dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di Madura salah satunya adalah rencana industrialisasi di Madura. Rencana membangun industrialisasi di Madura, merupakan inisiatif Presiden BJ. Habibi yang notabene sangat getol mendorong industralisasi di pulau garam ini, ssperti Batam yang cukup berhasil dan maju.[7]

Dari ulasan tersebut, sangat jelas sekali bahwa pembentukan BASRA oleh para ulama se- Madura, merupakan respon sosial terhadap pembangunan industri di Madura, yang secara sosial pasti akan berdampak nyata terhadap dinamika sosial masyarakat Madura, sehingga para ulama perlu bersatu untuk membangun kekuatan sosial dalam menjaga Madura dari dampak-dampak negatif industrialisasi. Faktanya, para ulama dalam BASRA ini, memang menolak kehadiran industralisasi di Madura, karena dianggap akan merugikan masa depan masyarakat Madura. Penolakan tersebut, tentu saja menjadi tantangan berat dalam misi meng-industralisasi Madura. Sehingga, pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya persuasif agar para ulama Madura bisa memahami tentang signifikansi industrilisasi di Madura.

[6] Wawancara dengan KH. Fauzi Rosul, salah seorang tokoh BASRA asal Kapedi Sumenep 12 Agustus 2017

[7] Disarikan dari hasil wawancara dengan KH. Taufikurrahman FM. Ia merupakan salah satu tokoh ulama Madura yang aktif di BASRA. Ia juga sebagai pengasuh di Ponpes Matlabul Ulum, Jambu Lenteng Sumenep Madura. (Wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2017)

Bahkan, bukan hanya masalah pembangunan Madura yang menjadi konsentrasi ulama BASRA. Sesuai dengan visi pembentukan BASRA, untuk mengawal masalah sosial dan agama di Madura, eksistensi para ulama BASRA senantiasa konsisten berjuang untuk kemaslahatan di bumi Madura. Pada sekitar tahun 2012, para ulama BASRA pernah dengan keras mengkritisi 5 (lima) rekomendasi Komnas HAM, terkait dengan masalah kebebasan agama. Para ulama yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (BASRA) menolak lima rekomendasi Komnas HAM, mereka menilai rekomendasi itu akan merusak norma-norma agama, khususnya umat Islam.[8]

Penolakan tersebut menunjukkan tentang kiprah perjuangan ulama BASRA dalam dinamika sosial keagamaan, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Penolakan ulama BASRA terhadap rekomendasi Komnas HAM, dapat dianggap sebagai bentuk protes keras ulama BASRA terhadap pemerintah agar mempertimbangkan kembali rekomendasi yang dianggap merugikan umat Islam tersebut. Berdasarkan data yang ada, kelima rekomendasi Komnas HAM yang ditolak oleh ulama BASRA tersebut. *Pertama*, menghapus laranan nikah beda agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, komisi ini merekomendasikan agar pencantuman agama dalam berbagai atribut kependudukan, termasuk dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hendaknya dihapus. *Ketiga*, menyoal tentang Undang-Undang Nomor 1 PNPS

[8] https : //www.nahimunkar.com/ 15 April 2012

Tahun 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan karena dianggap membatasi kebebasan beragama warga negara dengan mencap sesat orang yang berbeda keyainan dengan kelompok mayoritas. *Keempat*, tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri no. 9 Tahun 2006 (populer dengan sebuta SKB 2 Menteri). *Kelima*, Komnas HAM menginginkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan yang mengharuskan peserta didik mendapatkan pelajaran agama dan guru agama yang beragama sama hendaknya dihapus.[9]

B. Kebebasan Beragama dan Argumen Kebangsaan Ulama "Dalam Bingkai NKRI"

Pandangan Riaz Hasan tersebut memberikan ilustrasi tentang agama sebagai ciri khas keagamaan seseorang, termasuk umat Islam yang ada di Madura. Bagi masyarakat Madura, Islam telah menjadi identitas yang sangat esensial, sehingga komitmen keagamaan, sebagaimana telah digambarkan di atas, juga terjadi bagi masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam

Agama merupakan identitas Muslim yang esensial. Hal ini berlaku bagi semua Muslim, baik mereka yang saleh dan menjadi anggota oragnisasi keagamaan seperti Muhammadiyah di Indonesia, Jamaat-i-Islami di Pakistan, atau alIkhwan al-Muslimin di Mesir, atau mereka yang hidup di lingkungan masyarakat sekuler seperti Kazakhtan dan Turki.Ini juga berlaku bagi mereka yang berada di negara-negara non Muslim seperti India, Thailand, Jerman, Australia atau Amerika Serikat.

[9] http://mediamadura.com/2012/15/hello-wordl/ 15 April 2017

Konsekwensinya, komitmen keagamaan merupakan bukti sekaligus ungkapan dari identitas Muslim.[10]

Sebagai pulau santri, Madura mencerminkan sebuah daerah dengan penganut Islam yang sangat dominan. Tidak ada data pasti yang menjelaskan, persentase jumlah penganut agama Islam di Madura, tetapi ada yang menyebut umat Islam di Madura mencapai 92 % dari. Angka itu semakin menguatkan tentang dominasi umat Islam di Madura. Hanya sekitar 8 % dari masyarakat Madura yang tidak menganut agama Islam, baik itu Kristen, Budha dan lain sebagainya.

Namun demikian, dominasi ulamt Islam di Madura sama sekali tidak menjadi ancaman bagi penganut agama non Islam, bahkan keberadaan non muslim di Madura, sama sekali tidak mempengaruhi terhadap ikatan persaudaran sebagai sesama orang Madura. Antara yang muslim dan non muslim, sama sekali tidak sekat pemisah. Agama yang dianut sama sekali tidak dijadikan sebagai alasan untuk menafikan sesama warga Madura. Toleransi telah menjadi kekuatan antara muslim dan non muslim di Madura, sehingga mampu meniadakan potensi konflik karena faktor agama. Hal itu terjadi, karena orang Madura memahami hakikat kebebasan dalam beragama, sehingga tak perlu ada intimidasi dan provokasi dari satu pihak kepada pihak yang lain atasnama agama tertentu, yang pada gilirannya bisa menciptakan keretakan relasi sosial yang telah lama terikat sangat kuat. Kebebasan beragama di Madura begitu telah membumi, sehingga mampu memberikan jaminan terciptanya harmonisasi antara umat beragama.

[10] Riaz Hasan, *Keragaman Iman : Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada PPIM UIN Jakarta, 2006), hlm. 43

Sebagai elite sosial di Madura, kiai BASRA memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memaknai kebebasan agama di Madura. Sekalipun, umat Islam menjadi penganut agama terbesar di Madura, para ulama BASSRA, memiliki cara pandang yang cukup moderat. Prinsip kebebasan beragama yang melandasi cara berfikir mereka adalah komitmen terhadap NKRI dengan segala produk yang ada di dalamnya. Salah satu produk konsekwensi dari NKRI adalah adalah jaminan terhadap keragaman dalam semua aspek, termasuk di dalamnya keragaman dalam beragama.Intinya, NKRI memberikan jaminan kebebasan untuk menganut agama yang diyakini kebenarannya, tanpa diintervensi oleh siapapun.

Ketegasan ulama BASRA dalam terhadap kebebasan beragama dengan menjadikan toleransi dan keberagaman sebagai acuannya, juga telah terlihat dalam pemikiran disampaikan salah satu tokoh BASRA, KH. Mohammad Tidjani Djauhari (alm), dalam sebuah buku yang ditulisnya ketika menyinggung masalah konsep Madura sebagai *Baldaun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur,* dengan sejumlah nilai yang menjadi ciri khas di dalamnya. Salah satu yang ditegaskan oleh Tidjani adalah nilai-nilai ke-Indonesiaan. Menurutnya :

> Mengingat Madura masih merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pembangunan Madura jarus selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan yang rumusannya bisa kita baca dalam butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang lainnya, tertulis maupun tidak tertulis. Beberapa nilai-nilai keindonesiaan yang perlu dielaborasi dalam landasan pembangunan Madura adalah : budaya gotong royong,

sikap saling tolong menolong, *tepo seliro,* keberagaman, toleransi, dan lain-lain.[11]

Jelas dari gambaran di atas, bahwa tokoh BASSRA ini menempatkan masalah keberagaman dan toleransi yang harus menjadi ruh dalam pembangunan Madura, sehingga dalam aspek kebebasan beragama, arah pemikirannya menjadi relevan dengan konsep rahmatan lil alamin. Toleransi dan keberagaman dalam tlisan Tidjadi di atas, membuktikan tentang komitmen ulama BASRA dalam menjaga keharmonisan antar agama di Madura. Apalagi, Tidjani sendiri dengan tegas menyebutkan Madura sebagai bagian darai NKRI, sehingga kebijakan dan dinamika sosial-keagamaan di Madura, harus tetap berada dalam segala produk kebijakan yang telah ditentukan oleh sistem pemerintahan NKRI.

Mengembalikan kebebasan beragama terhadap NKRI, sebagaimana menjadi dasar berfikir ulama BASRA, menunjukkan tentang pola pikir terbuka terhadap penganut agama lain. Kebebasan beragama yang mendapatkan perlindungan dalam NKRI, pada gilirannya melegitimasi sikap dan perilaku ulama BASRA dalam memaknai perbedaan agama di Madura. Pandangan itu, salah satunya diungkapkan oleh KH. Taufikurrahman FM. Menurut ulama BASRA asal Sumenep ini:

> Kami tetap dalam bingkai NKRI. Bhinneka Tunggal Ika tetap kita jaga. Kita tetap menghargai perbedaan-perbedaan antar agama. Akan tapi, hal-hal yang wajar. Seperti yang terjadi di Sampang. Ada insiden tentang Tajul

[11] KH. Mohammad Tidjani Djauhari, *Membangun Madura* (Jakarta : Taj Publishing, 2008). *hlm. 86.* Secara utuh Tidjani mengulas masalah konsep Madura *Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur* ini, berdasarkan 4 (empat) nilai dasar sebagai ruh di dalamnya, antara lain nilai-nilai ke-Islaman, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keindonesiaan, dan nilai-nilai kemaduraan. (hlm. 84-87).

> Muluk, yang terjadi insiden dengan masyarakat *ahlussunah*, sehingga terjadi korban pembunuhan. Ada satu orang yang meninggal. Kami sikapi masalah itu, baik kepada Menteri Agama dan Kapolda, agar tidak terjadi bentrokan lagi. Karena antara mereka terjadi perbedaan. Tidak mungkin bisa disatukan, tanpa mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak mungkin ketemu, akhirnya mereka (Syiah, *penulis*) diungsikan ke Sidoarjo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar tidak terjadi bentrokan susulan antara Syiah dan Sunni.[12]

Dalam konteks itu, ulama di Madura, terutama ulama BASRA sejatinya tidak pernah mempersoalkan kebebasan beragama selama dilakukan dengan konteks yang wajar dan tidak menganggu penganut agama lain. Kebhinnekaan menjadi dasar berfikir mereka dalam menyikapi perbedaan agama di Madura. Para ulama itu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan beragama yang dibenarkan dalam bingkai NKRI, sehingga menjaga dan memelihara keragaman beragama menjadi tugas bersama untuk dijaga. Kiai Hasan (atau kalangan santri biasa memanggil Ra Hasan), salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Bata-Bata Pamekasan, juga membenarkan adanya kebebasan beragama dalam wadah NKRI yang telah memberikan jaminan keamanan dalam membumikan kebebasan dalam menjalankan agama yan diyakini oleh warganya. Menurutnya bahwa semuanya dalam bingkai NKRI. Perbedaan apapun yang terjadi, konteksnya mereka tetap dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan NKRI.[13]

Ketika NKRI yang menjadi dasar pemikiran, secara otomatis telah memberikan gambaran tentang cara pandang para ulama Madura bahwa konsep final NKRI dianggap sebagai pilihan

[12] Wawancara dilakukan pada, 21 Agustus 2017.
[13] Wawancara dilakukan pada 20 Agustus 2017

tepat, karena prinsip yang dibangun dalam NKRI adalah keragaman dalam semua aspek. Semua perbedaan yang menyatu dalam wadah NKRI ibarat telah menjadi satu tubuh, yang tidak terpisahkan, termasuk di dalamnya perbedaan dalam beragama. Kebebasan beragama dalam bingkaua NKRI yang menjadi dasar berfikir para ulama di Madura, secara substansial memberikan isyarat tentang sikap dan respon positif ulama dalam memaknai hubungan agama dengan konsep bernegara NKRI. Artinya, perbedaan agama yang terjadi di Madura, sejatinya ditempatkan sebagai bagian dari khazanah nusantara yang dibenarkan dan dilindungi oleh negara, sehingga penghormatan dan toleransi terhadap keragaman agama menjadi sesuatu yang *given*. Para ulama menerima setiap perbedaan agama di Madura, sebagai konsekwensi dari komitmen menjunjung tinggi konsep negara dalam bingkai NKRI.

Dalam keterkaitan itu, NKRI merupakan refleksi dari negara yang memiliki ciri khas keragaman (pluralitas) yang kuat. Pluralitas itu pada gilirannya diikat oleh satu kekuatan bernama NKRI dan Pancasila sebagai ideologi di dalamnya. Ketika para ulama Madura menyatakan NKRI sudah final, maka keragaman juga sudah bisa dipastikan telah dianggap final, sehingga tak perlu dipersoalkan. Bahkan, wajib diterima apa adanya, dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk saling menyakiti dan menafikan. Menempatkan kebebasan beragama, dalam bingkai NKRI merupakan bentuk pengakuan yang tulus kalangan ulama dalam menerima konsep NKRI secara *kaffah.*

Dengan mematok NKRI sebagai pondasi dalam membangun kebebasan beragama di Madura, sudah pasti akan memberikan keyakinan tentang tumbuhnya toleransi dan kerukunan yang

harus dibanguan. Karena dalam kebebasan beragama, setiap orang di Madura memiliki hak yang sangat azazi untuk menentukan keyakinan sendiri, tanpa merasa terancam dan ketakutan dari pihak manapun. Sebagimana komitmen ulama terhadap NKRI, komitmen ulama dalam menjaga kebebasan beragama dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Undang-Undang menjadi komitmen para ulama Madura.

NKRI adalah negara plural yang merangkum keragaman dalam semua aspeknya, termasuk keragaman agama dan keyakinan. Semuanya hidup dan tumbuh subur menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, bahkan berkembang secara alamiah dalam sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Menurut Listiyono Santoso, bahwa :

> Negara yang plural dari segala aspeknya memerlukan *common denominator* yang tidak berasal dari satu aspek. Dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya dalam pluralitas tersebut berakibat pada pereduksian konsep negara bangsa yang di dalamnya berisi berbagai agama, suku, dan bahasa. Karenanya, penerimaan Pancasila dalam keadaan seperti itu adalah konsekwensi logis yang tidak bisa ditolak.[14]

Pancasila yang menjadi dasar NKRI telah menjadi pondasi yang mampu memberikan inspirasi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa, termasuk membangun kehidupan antar umat beragama yang harmonis dan dinamis. Menerima NKRI seperti yang terlihat dalam pandangan para ulama BASRA, berarti telah sepakat dengan ajaran yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan bukti

[14] Lihat Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur* (Yogjakarta : Ar-Ruzz, 2004), hlm. 254

adanya komitmen dalam menjaga NKRI secara utuh. Para ulama BASRA, bukan hanya menjadi wadah para kiai berkumpul dan berdiskusi, tetapi juga menjadi pusat perjuangan para ulama dalam menjaga semangat NKRI di Madura, antara lain dilakukan dengan menjaga keragaman melalui transformasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Madura.

Apalagi, ulama BASRA telah menyatakan diri sebagai kekuatan strategis dalam mengawal perkembangan masyarakat Madura. BASRA telah hadir sebagai penjaga marwah masyarakat Madura ; agar tetap eksis dan maju sesuai dengan karakteristik yang telah dimiliki. Sebab, toleransi tidak hanya cukup diajarkan, tetapi harus dikawal secara proaktif. Toleransi harus dibangun dengan kesadaran maksimal serta kerja-kerja transformasi dalam ruang-ruang sosial masyarakat Madura. Ngainum Naim menulis bahwa sikap toleransi tidak terbangun dengan sendirinya. Bisa jadi kesadaran tersebut lahir karena dialektika yang berlangsung secara produktif dalam dinamika hidup yang panjang. Sebaliknya, sikap dasar manusia yang tidak toleran akan semakin kukuh dan, dalam kondisi tertentu, memformula menjadi fundamentalisme, ketika menemukan faktor-faktor pendukung.[15]

Dalam konteks itu, secara umum corak berfikir ulama BASRA dalam memandang kebebsan beragama lebih bersifat substantif dan kontitutif. Substantif artinya bahwa Islam yang dipahami adalah yang ramah dan mengedepan nilai-nilai ideal ajaran Islam dalam memandang umat lain. Islam dipahami dengan kacatama yang keras, tetapi Islam yang bisa memberikan rahmat

[15] Lihat Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu dalam Keragaman* (Yogyakarta : TERAS, 2011), hlm. 43

bagi yang lain. Sementara konstitutif adalah bahwa kebebasan agama telah diatur dengan jelas dalam UU, sehingga proses keberagamaan setiap individu telah mendapatkan perlindungan dari negara. Maka, arogansi dan intimidasi keagamaan terhadap penganut agama lain, merupakan pengingkaran yang nyata dari terhadap undang-undang. Tidak heran, apabila ulama BASRA memiliki pandangan yang cukup akomodatif dalam memandang penganut agama selain Islam sebagai bagian dari kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk di Madura. Kebebasan dalam beragama telah dipahami sebagai hak asasi manusia, yang dilindungi oleh UU serta telah dijelaskan oleh agama, sehingga pemaksaan terhadap penganut agama tertentu, merupakan bentuk kedzoliman yang nyata.

Oleh karena itu, M. Dawam Rahardjo menulis dengan sangat gamblang tentang kebebasan dalam keberagamaan :

> Beragama sebenarnya adalah sebuah pernyataan terikat secara sukarela kepada suatu peradaban. Dalam beragama tidak ada paksaan. Beragama adalah sebuah sikap dan tindakan manusia merdeka, yaitu merdeka dalam menentukan pilihan hidup. Dengan adanya unsur paksaan, maka keberagamaan itus sendiri dengan sendirinya batal. Tetapi setelah menyatakan dirinya terikat kepada suatu keteraturan atau peradaban, maka seseorang telah melepaskan kebebasan yang lebih rendah nilainya, kepada kebebasan yang lebih tinggi, yaitu kebebasan yang menjamin tercapainya kebaikan. Jika timbul suatu lembaga yang memaksa, misalnya organisasi atau negara, maka lembaga itu sebenarnya hanyalah sebuah perwujudan amanah kolektif untuk menjaga kebebasan yang nilainya lebih tinggi itu.[16]

[16] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 339

C. Respon Ulama atas Percikan Konflik Agama "Syiah-Sunni Sampang"

Konflik antara penganut Syiah dan Sunni yang pernah terjadi di Kabupaten Sampang, oleh sejumlah kalangan dianggap sebagai bagian dari kejadian yang mengganggu kebebasan diantara umat beragama. Konflik yang sempat melahirkan aksi kekerasan tersebut dan berujung terhadap pengusiran warga Syiah telah menjadi noda tersediri dalam kehidupan keberagamaan di Madura. Sebab, kekerasan terhadap penganut agama, dapat menimbulkan kerenggangan sosial yang bisa mengancam terhadap semangat kerukunan dan toleransi beragama di Madura. Konflik Syiah dan Sunni yang terjadi di Sampang, secara faktual menjadi bagian fokus perhatian kalangan ulama, karena konflik tersebut bukan hanya telah melahirkan perbedaan pandangan keagamaan, melainkan juga telah melahirkan kekerasan diantara kedua belah pihak. Bahkan, sejumlah kalangan telah memposisikan kasus Syiah di Sampang sebagai bagian dari kejadian yang telah meruntuhkan kebebasan beragama, dan yang lebih ekstrem kejadian tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal itu, misalnya diungkapkan dalam buku Laporan Hak Azasi Manusia Tahun 2014. Berkaitan dengan Kasus Syiah Sampang, dalam laporan tersebut tertulis :

> Kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan di Indonesia, telah menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan hingga saat ini. Setidaknya lima tahun terakhir, pelanggaran HAM tidak hanya dialami oleh jamaah Ahmadiyah, namun juga umat Kristiani, bahkan

belakangan dialami oleh pemeluk Syiah, di Sampang Madura.[17]

Berdasarkan kutipan tersebut, kasus kekerasan Syiah Sampang telah dimasukkan sebagai bagian pelanggaran HAM dan secara otomatis – suka atau tidak suka – telah masuk dalam konteks gagangguan terhadap kebebasan beragama yang notabene menjadi perhatian semua pihak di Madura.

BASRA secara khusus telah mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus Syiah-Sunni di Sampang tersebut. Bahkan para ulama BASRA dengan tegas bahwa praktek keagamaan yang dilakukan oleh warga Syiah di Sampang dianggap telah mengganggu ajaran keagamaan warga Sunni. Ulama yang tergabung dalam BASRA, bahkan memiliki pandangan yang sama tentang perilaku keagamaan Syiah Sampang sebagai perilaku yang menodai prinsip keagamaan dan dapat memacu konflik di tengah-tengah masyarakat. Para kiai yang tergabung dalam BASRA, baik langsung ataupu tidak, telah menganggap gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Syiah telah melampaui ajaran keagamaan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam, sehingga bukan perbedaannya yang menjadi akar masalah, melainkan sikap dan perilaku keagamaan yang ditampilkan oleh aliran Syiah ini belum dilakukan dengan etika dan perasaan orang Madura secara umum.

Namun demikian, aksi kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang yang pada gilirannya memaksa mereka harus diungsikan ke wilayah lain, sejatinya untuk mengantisipasi

[17] Lihat. Dalam Laporan Hak Azazi Manusia dengan judul *"Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia"* (Jakarta : Solidaritas Perempuan Indonesia, 2014), hlm. 2

keselamatan para penganut Syiah itu. Kebijakan untuk mengungsikan kalangan penganut Syiah tersebut, sebenarnya bukanlah pengusiran, melainkan sebagai upaya agar tidak terjadi aksi kekerasan oleh masyarakat yang merasa terganggung dengan perilaku keagamaan penganut Syiah. Keterlibatan BASRA dalam konteks menjaga dan mengantisipasi aksis kekerasan terhadap masyarakat yang beda keyakinan tersebut, salah satunya dengan cara memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman, karena ulama BASRA secara tegas menolak aksi kekerasan atas nama agama. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh KH. Syarifuddin Damanhuri :

> Tidak boleh anarkis. Kalau terjadi anarkis, ya bukan karena ulama, karena ulama melerai aksi anarkis itu. Seperti yang terjadi pada waktu di Sampang (kasus Syiah, pen), itu bukan karena diusir oleh ulama, tetapi ulama menyelamatkan mereka dari orang-orang yang mau menyerang.[18]

D. Kebebasan Agama Dengan Spirit Piagam Madinah

Ulama BASSRA memang telah mewacanakan Madura sebagai Serambi Madinah, pada saat pertemuan dengan sejumlah ulama BASSRA di Kabupaten Sampang. Saat itu, para ulama mendeklarasikan *icon* baru pulau Madura sebagai Serambi Madinah. Gagasan tersebut berangkat dari satu kondisi bahwa Madura memiliki karakter keagamaan melebihi masyarakat Aceh yang sudah terlebih dahulu mengklaim sebagai Serambi Mekkah,[19]

[18] Wawancara dengan KH. Syarifuddin Damanhuri asal Bangkalan 12 Agustus 2017

[19] Wawancara dengan KH. Fauzi Rosul, 22 Juli 2017

Menurut pengkuan sejumlah ulama BASRA, wacana Serambi Madinah memang muncul saat pertemuan ulama di Sampanng dan saat itu telah dideklarasikan saat kepemimpinan Bupati Fadhilah Budiono, tetapi konsep ini masih sebatas`wacana dan belum diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan taktis bagaimana nilai-nilai madinah itu bisa terbumikan. Namun demikian, gagasan menjadikan Madura sebagai Serambi Madinah oleh kalangan ulama BASRA, tetap menjadi gambaran tentang komitmen para ulama dalam menjaga Madura.

> Sebenarnya bukan wewenang BASRA (soal Serambi Madinah, *pen*). Hanya saja para ulama saat itu, muncul gagasan agar Madura menjadi Serambi Madinah, setelah sebelumnya Aceh sudah dinyatakan sebagai Serambi Mekah. Saat itu sudah dideklarasikan bersama Bupati Sampang, tetapi sampai saat ini masih sebatas wacana saja, belum ada kegiatan yang konkret. Jadi, kami (BASRA) tetap memiliki keinginan agar Madura ini menjadi seperti kota madani, seperti kota yang di bangun oleh Rasulullah. Misalnya, keramahannya, apalagi orang Madura sudah terkenal keramahannya.

Berbeda dengan Serambi Mekah, pilihan Madura sebagai Serambi Madinah yang digagas oleh kalangan ulama BASSRA, sebenarnya merupakan pilihan memang mendukung terhadap kultur masyarakat Madura, terutama kultur toleran terhadap sesama antar umat beragama. Sebab, Madinah tidak hanya sekedar menggambarkan tentang tempat suci umat Islam, melainkan Mainah telah terbukti dalam sejarah umat Islam mampu merefleksikan tentang sebuah negara yang mengadopsi sistem multikultur melalui Piagam Madinah yang sangat terkenal. Kontrak sosial dalam Piagam Madinah yang paling mendasar adalah penghargaan terhadap kebebasan beragama

serta aturan main dalam memandang penganut agama lain. Sebab, Piagam Madinah tidak hanya memberikan jaminan terhadap kaum muslim, tetapi juga menggambarkan tentang sistem kehidupan multikultur yang sangat toleran. Non muslim mendapatkan tempat yang pasti dengan jaminan perlindungan sosial yang sama serta mendapatkan kebebasan dalam menjalankan keyakinannya. Dalam semangat Piagam Madinah, non muslim tidak lagi menjadi *the other*, tetapi menjadi saudara, teman dan tetangga dalam konteks kemanusiaan.

Semangat Piagam Madinah tersebut tampak menginspirasi para ulama Madura dalam membentuk kehidupan antar umat beragama di Madura.Kebebasan menjalankan agama yang diyakini sebagaimana telah diberikan terhadap non muslim dalam konsep Piagam Madinah. Madura sebagai Serambi Madinah telah menjadi petunjuk atas komitmen kalangan ulama tersebut dalam menghargai kebebasan agama di Madura.

> Perbedaan agama di Madura tak ada masalah. Selama ini, BASRA selalu menghargai perbedaan agama. Kita tidak pernah mengganggu Gereja, Vihara dan lain sebagainya. Kita tetap menghargai mereka.[20] Lebih lanjut ia mengatakan: Toleransi itu adalah sebatas menghargai keberadaan mereka (non muslim, pen). Seandainya BASRA tidak menghargai, mngkin akan banyak kekisruhan-kekisruhan di Madura. Tapi, semua itu masih bisa dicegah. Karena ulama-ulama BASRA masih didengarkan oleh masyarakat Madura.

Dengan ungkapan tersebut, jelas respon ulama BASRA dalam menjaga kebebasan beragama di Madura. Keberadaan non muslim yang minoritas di Madura, tetap dihargai dan bisa menjalankan keyakinan masing-masing tanpa merasa takut.

[20] Wawancara dengan KH. Fauzi Rosul, 22 Juli 2017

Para ulama Madura telah memastikan penghargaan terhadap mereka selama dilakukan dengan tetap menjaga batas-bata toleransi yang dibenarkan. Umat non muslim tetap memiliki hak yang sama untuk melakukan kegiatan sosial dan keagamaan, selama tidak dimaksudkan untuk mengganggu umat Islam dengan kegiatan yang tidak dibenarkan. Keberadaan penganut agama non muslim, sama sekali tidak diposisikan pada domain yang berbeda, karena para ulama sendiri yang menjadi kekuatan masyarakat Madura, tetap menghargai dan menghormati keberadaan mereka dan dapat menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran mereka, selama tidak mengganggu ajaran dan perilaku keagamaan umat Islam di Madura.

Maka, keberadaan bangunan religius masyarakat non muslim di Madura, selama ini memang tetap dalam kondisi aman dan menjadi tempat yang nyaman bagi mereka dalam menjalankan agama mereka. Salah satunya adalah tempat ibadah Vihara di desa Polagan Larangan Pamekasan, serta Gereja dan Klenteng di Desa Pabian Kabupaten Sumenep. Tempat-tempat ibadah, menjadi tempat ibadah yang cukup fenomenal karena berada di pusat umat Islam. Baik Vihara, Klenteng dan Gereja tersebut, telah menjadi *icon* perbedaan agama di Madura sekaligus menjadi bukti komitmen masyarakat Madura dalam menghargai keberadaan mereka.

Masyarakat Madura yang menganut agama Kristen, Hindu atau Khong Hucu, dapat beribadah di tempat-tempat tersebut tanpa merasa terganggu. Umat Islam sama sekali, tidak merasa terganggu dengan keberadaan mereka, sehingga aura toleransi menjadi sangat terasa. Bahkan, khusus di desa Pabian, kedekatan masyarakat muslim dan non muslin begitu sangat luar basa,

bukan hanya secara fisik mereka bertetangga, melainkan tempat ibadah setiap agama mereka juga saling berdekatan dengan jarak yang relatif sangat dekat.

Penegasan KH. Fauzi Rasul di atas, merupakan legitimasi tentang komitmen kebebasan agama yang diyakini oleh para ulama Madura. Maka, ungkapan "perbedaan agama di Madura tidak ada masalah" memang benar adanya. Konflik agama yang melibatkan penganut agam lain tidak pernah terjadi di Madura, bahkan antara penganut agama Islam dan non muslim, telah hidup rukun tanpa mempermasalahkan keyakinan yang dianut. Ulama BASSRA telah berjibaku memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap masyarakat dalam membina kehidupan yang toleran. Potensi-potensi konflik antar agama yag rentan lahir di tengah-tengah masyarakat, secara perlahan dapat dicegah oleh para ulama dan pesantren di Madura. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat Madura tetap menjadikan ulama sebagai pengayom masyarakat yang sangat vital dalam membangun dan menjaga martabat Madura.

Sebagaimana halnya Piagam Madinah, semangat membangun toleransi di Madura juga sangat terasa dan betul-betul dinamis dalam sepanjang sejarah hubungan antar agama di Madura. Berbagai pontensi konflik agama, nyaris tidak terjadi di Madura walaupun mayoritas beragama Islam, sehingga kondusifitas relasi umat beragama di Madura, betul-betul harmonis. Dengan kekuatan ulama, toleransi antar umat beragama itu, masih tetap terjalin dengan baik sampat saat ini. Walaupun demikian, ulama BASRA juga memiliki pandangan tentang batasan toleransi, sehingga keberadaan umat Islam yang ada di Madura, tidak hanya sekedar mengargai, tetapi juga memiliki

batasan toleransi yang bisa dipahami oleh semua pihak. Batasan toleransi tersebut tidak boleh dilanggar oleh setiap penganut agama yang ada di Madura. Menurut KH. Taufiqurrahman FM, toleransi antar umat beragam ini sebenarnya adalah saling menghargai terhadap keyakinan masing-masing di dalam agama yang dianut, kalau sudah tidak bisa saling meghargai atau bahkan saling menghujat, hal itu akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Bahkan, menurut KH. Taufik, kami (ulama, pen) tidak ada masalah dengan kalangan Kristen dan lainnya. BASRA juga seringkali melakukan komunikasi dengan mereka apabila terjadi benturan-benturan yang terjadi antara kelompok muslim dan non muslim. Misalnya, ketika terjadi konflik masalah pembangunan Gereja yang tanpa ijin dan lain sebagainya, ulama BASRA turun tangan membantu mencari penyelesaiannya, kalau memang layak didirikan (gereja itu, *pen*) dalam suatu daerah dengan penghuni yang cukup, sama sekali tidak ada masalah.

Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan beragama di Madura, menurut KH. Taufik, tidak boleh ada perilaku penghancuran Gereja, tidak boleh ada intimidasi terhadap penganut agama lain yang tidak beragama Islam. Saling hormat dan menghargai terhadap penganut agama lain, harus dilakukan, selama tetap dalam konteks yang wajar dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dalam konteks itu, respons ulama BASRA terhadap kebebasan agama di Madura menunjukkan komitmen yang besar dalam membangun kehidupan antar umat beragama yang toleran. Kebebasan beragama yang menjadi kunci dalam bangunan toleransi, telah menjadi dasar bagi kalangan ulama BASRA untuk berjuang guna menjaga semangat toleransi di

Madura. Kebebasan beragama tetap terjaga dan umat non muslim tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan aturan. Bahkan, seperti yang diungkapkan oleh KH. Taufikurrahman FM, ulama BASRA juga bisa turun langsung menyelesaikan konflik pembangunan gereja di tengah-tengah masyarakat, dan menyelesaikan secara adil apabila sesuai dengan aturan yang berlaku.

Argumentasi ulama BASRA tentang kebebasan dalam beragama memiliki relevansi dengan semangat kebebasan agama sebagaimana diatur dalam al-Qur'an. Islam secara terbuka, tidak membenarkan pemaksaan dalam beragama, tetapi memberikan kebebasan bagi setiap invidu untuk memlih dan menentukan agama yang diyakininnya. Hal itu telah ditegaskan melalui sejumlah firman Allah SWT dalam al-Qur'an. *Pertama*, Allah berfirman : *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) ; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah."*[21] *Kedua*, disebutkan "*untukmulah agamanu, dan untukkulah agamaku".*[22] *Ketiga*, juga disebutkan "*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya".*[23]

Oleh karena itu, cara berfikir yang cukup moderat di kalangan ulama BASRA dalam memandang persoalan kebebasan beragama, menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen dalam memahami agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin.* Bahwa masyarakat non muslim, bukanlah musuh yang harus diperlakukan tidak adil, melainkan sebagai saudara

[21] Qs. Al-Baqarah, [2] : 256
[22] Qs. Al-Kafirun, [109] : 6
[23] Qs. Yunus, [10] : 99

kemanusiaan, yang sama-sama berhak mendapatkan kebebasan dalam beragama. Apalagi, kebebasan beragama tersebut telah ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam konteks ke-Indonesiaan, kebebasan beragama telah mendapatkan tempat yang sama di mata konstitusi, termasuk juga dalam konstitusi Madinah di bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Seperti digambarkan oleh Muhammad Alim :

> Begitulah bagaimana seharusnya (*das sollen)* atau *law in text* menurut ajaran Islam. Begitu juga kenyataannya (*das sein)* atau *law in action* yang dipraktekkan oleh umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW di negara Madinah. Kaum muslim dengan agama Islam, Kaum Yahudi dengan agama mereka sendiri. Perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam negara Madinah tersebut adalah hadist, sumber kedua, sesudah al-Qur'an, dari ajaran Islam.[24]

Piagam Madinah yang telah dicetuskan oleh Nabi Muhammad merupakan pengalaman sangat penting dalam konteks relasi antar umat beragama. Kontrak sosial yang menjadi bagian dalam konsepsi Pagam Madinah, pada dasarnya menjadi rujukan semua pihak, terutama kalangan ulama yang ada di Madura. Deklarasi Madura sebagai Serambi Madinah, tidak bisa dilepaskan dari upaya membumikan nilai-nilai Piagam Madinah di Madura, karena Piagam Madinah pada hakikatnya merupakan kontrak politik dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aspek agama.

Bangunan prinsip yang melandasi hubungan antar umat beragama dalam Piagam Madinah, meliputi beberapa hal, seperti

[24] Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogjakarta : UII Press, 2001), hlm. 96

digambarkan oleh Zakiyuddin Baidhawi.[25] *Pertama*, Piagam Madinah secara gamblang dan lugas memberikan jaminan atas keragaman keyakinan dan kepercayaan keagamaan. Hak untuk bebas memilih dan menganut agama serta menjalankan keyakinannya itu memperoleh perlindungan. *Kedua*, warga yang tidak berakidah Islam, sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki partisipasi yang sama dan penuh dalam kehidupan sosial politik. *Ketiga*, warga yang tidak berakidah Islam, namun menyepakati kontrak politik, berhak mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka. *Keempat*, warga non muslim mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama dengan warga muslim dalam persoalan politik dan publik. *Kelima*, negara bertanggungjawab penuh terpeliharanya hak-hak warga negara non muslim.

[25] Pandangan ini dikutip dalam Amirulloh Syarbini, *Mutiara al-Qur'an : Pesan Al-Qur'an untuk Mengatasi Problematikan Umat dan Bangsa* (Jakarta : as@-prima pustaka, 2012) hlm. 108

Bab IV
BAGIAN AHIR
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain. Pertama, BASRA sebagai bagian dari waah elit sosial agama di Madura memiliki peran yang penting dan strategis, terutama dalam mengawal perkembangan Madura. Dalam perkembangannya, BASRA telah banyak merespun isu-isu sosial yang berkebang di Madura, bukan hanya masalah agama tetapi juga masalah pembangunan Madura. Hal itu menunjukkan bahwa BASRA memang memiliki peran strategis dalam dinamika kehidupan masyarakat Madura.

Kedua, para kiai BASRA memiliki pandangan yang sama tentang perbedaan agama sebagai konsekwensi hidup dalam NKRI. Para ulama BASSRA sepakat, perbedaan agama tetap harus dikembalikan pada semangat NKRI yang noateben memberikan peluang yang sama untuk memilih keyakinan

dan agama, bahkan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan.

Ketiga, bagai ulama BASRA penganut agama non muslim adalah sama secara sosial dan memiliki hak yang sama dalam membangun Madura. Bagi ulama BASRA mereka juha harus dihormati, selama tidak menganggu kehidupan keagamaan masyarakat Madura.

B. Rekomendasi dan Saran

Hasil riset berupaya melakukan hal yang lebih baik yang berupa rekomendasi yang bukan berararti menggurui, namun sebagai masukan agar setiap perbincangan ulama santri dan pesantren terlebih perkumpulan ulama dalam hal ini BASRA patut dan layak bagi kita semua untuk tetap menjaga dan mengajarkan perdamaian, kebersamaan, persatuan sebagai simbol keberagaman sekaligus menebar misi kemaslahatan bagi lingkungan sekitarnya. Namun dalam tataran praktis terutama ketika bersentuhan dengan konteks sosiologis, wajah tampilan realitas pesantren seringkali tidak seideal seperti yang diharapkan dalam kerangka normatif. Bahkan yang terjadi kerapkali wajah warga bangsa ini tampak bopeng, tercoreng dan ternoda dengan stigma dalam kecamuk konflik, horizontal, komunal, sektarian, budaya, ekonomi, dan bahkan politik bahkan agama sering disebut sebagai pemicu sebuah konflik . Dengan fakta demikian sebenarnya bukan kesalahan dari dogma agama itu sendiri, melainkan lebih di akibatkan karena *human error* yakni sikap dari para segelintir pemeluknya yang kadangkala menginterpretasikan ajaran *teologis-normatif* secara

serampangan, dengan tidak menggunakan paradigma yang mejadi esinsinya secara utuh.

Sebagai pucuk pimpinan pesantren kiai terlebih pra ulama sebagai seorang alim harus mempunyai bekal keilmuan yang bisa menempatkan semua paradigma sesuai dengan wilayah kajiannya sehingga ketika Islam dikaji secara komperhensip tidak dengan cara parsial dan dengan melihat sepert kacamata kuda berupa adanya klaim fanatisme dengan mengklaim dirinya atau kelompoknya paling benar dan yang lain dianggap salah atau tidak sah, padahal perbedaan selama bukan pada suatu perpecahan yang berujung saling menjatuhkan, intinya perbedaan tidak dilarang yang dilarang adalah perpecahan, sebab dalam suatu perbedaan didalamnya terselipdengan sebuah kekuatan yang dapat berakibat stigma negtif, padahal Madura oleh para kiai dan ulama terutama para ulama yang tergabung dalam BASRA dipelot sebagai serambi madinah yang dapat memberikan rasa kedamaian dalam keberagaman.

Butuh *key word* alternatif-solutif dalam menjaga dan berusaha tetap memelihara persatuan-kesatuan ke-warganegara-an kita yang terpayungi dalam bingkai ke-Bhinnika-an dan Ke-NKRI-an demi keutuhan bangsa Indonesia Madura secar khusu kini dan untuk selamanya Selanjutnya kita bisa mengkorelasikan pada berbagai kasus yang marak terkait isu kewarganegaraan, sehingga kita sebagai insan yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran yang telah dianugerahi kemampuan yang membedakan antara yang baik dan buruk sehingga kita mempunyai pemahaman dengan paradigma multiperspektif.

Penting sebagai saran mepertimbangkan segala aspek yang menjadi wilayah kajian varian agama kesemrautan dari

pemahaman yang cenderung menggunakan topeng agama selalu menjadi kebutuhan dan dikonsumsi untuk kepentingan ketiaknya secara membabibuta yang sifatnya lebih pada kepentingan yang bersifat profan, sehingga subjektivitas pemhaman dalam keberagamaan dalam beragama menjadi tumbuh subur dengan dalih agama sebagai alasa normatif yang sering dijadikan sebagai kedok argumentasinya, naifnya justru yang terjadi bermuara pada pelakunya yang malah bersembunyi ditubuh agama yang sakral, dengan kedok penjatuhan, penistaan dan penghakiman sepihak serta pengaklaiman diri paling benar dari kelompok lain adalah hal yang sangat kita disayangkan dan bangsa kita menjadi mundur dengan tujuan kedamaian para ulama BASRA sesuai cita-cita luhur piagam Madinah yang dicita-citakan.

Daftar Pustaka

A'la, Abd., *"Membaca Keberagamaan Masyarakat Madura"*, dalam Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* Yogjakarta : Pustaka Marwa, 2004.

Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* Yogjakarta : UII Press, 2001.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: tp, tt.

Djauhari, Tidjani KH. Mohammad, *Membangun Madura* Jakarta : TAJ Publishing, 2008.

Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisi Teks Media* Yogjakarta : LKiS, 2005.

Hasan, Riaz, *Keragaman Iman : Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada PPIM UIN Jakarta, 2006.

http://mediamadura.com/2012/15/hello-wordl/ 15 April 2017.

https : //www.nahimunkar.com/posted on 15 April 2012.

Ismail , Faisal, dkk, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai* Yogjakarta : Tiara Wacana, 1999.

Kuswandi Iwan dan Hasyim, Wahid, Abdul *Mengenal Kiai Tidjani,* (Surabaya: Qawiyyul Amin, 2007.

_____, *Ulama Negosiator Pesantren; Teladan dan Pengaman Hidup KH. Moh. Tidjani,* Yogyakarta: Pondok Mas, 2011.

Laporan Hak Azazi Manusia dengan judul *"Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia"* Jakarta : Solidaritas Perempuan Indonesia, 2014.

Naim, Ngainun, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam* Keragaman Yogjakarta : Teras, 2011.

Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Instritusi*, Jakarta; Erlangga, 2008.

Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cenekiawan Muslim,* Bandung: Mizan, 1999.

_____, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* Jakarta : Paramadina, 2002.

Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur* Yogjakarta : Ar-Ruzz, 2004.

Sattar, Abdullah, Badan Silaturrahmi Ulama Madura; Da'wah multi fungsi, Jurnal, *Komunikasi Islam,* vol. 4 nomor 2, 2014.

Syarbini, Amirulloh, *Mutiara al-Qur'an : Pesan Al-Qur'an untuk Mengatasi Problematikan Umat dan Bangsa* Jakarta : as@-prima pustaka, 2012.

Talbi, Mohamed, *"Kebebasan Beragama"*, dalam Charles Kurzman (editor), *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* Jakarta : Paramadina, 2003.

Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* Yogjakarta : LKiS, 2004.

Ummatin, Khoiro, *Perilaku Politik Kiai* Yogjakarta : Pustaka pelajar, 2002.

Wawancara dengan KH. Syarifuddin Damanhuri asal Bangkalan 12 Agustus 2017.

Wawancara KH. Fauzi Rosul, salah seorang tokoh BASRA asal Kapedi Sumenep 22 Juli 2017 dan 12 Agustus 2017.

Wawancara KH. Taufikqurrahamn. FM dilakukan pada 21 Agustus 2017.

Wiyata, A. Latif *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* Yogjakarta : LKiS, 2006.

Zahro, Ahmad , *Tradisi Intelektual NU* Yogjakarta : LKiS, 2004.

Curriculum Vitae

a. Idenitiatas Diri

- Nama : Mukhlishi
- Alamat : Gapura Tengah Gapura
- Tetala : Sumenep, 12 Desember 1985
- Motto hidup : Teladani Ilmu Padi tambah berisi makin merunduk
- Pekerjaan : Dosen STKIP PGRI Sumenep
  : Dosen STAIM Tarate Sumenep
- Contak Person : 085 335 777 549 – 08193499 1985-0877 0216 1985 (WA)
- Orang Tua ayah : Rahnawi
  Ibu : Niwa
- E-Mail : mazlisyibty@gmail.com
  : lisyi@stkippgrisumenep.ac.id.

b. Riwayat Pendidikan

- MD non Formal : Nurul Islam Tamidung Batang-Batang 1998
- SD/MI : MI Nasa Gapura Timur lulus 1999
- SMP/MTs : MTs Nasa Gapura Timur lulus 2003
- SMA/MA : MA Nasa Gapura Timur lulus 2006
- PT :

a. S-1 PAI STIKA An-Nuqayah lulus 2010

b. S-2 Magister Studi Islam UM Surabaya lulus tahun 2013

c. S-3 Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya lulus tahun 2016

c. Pengalaman Organisasi

- Pengurus IPNU Ancab Gapura 1998-2000
- Pimpinan Redaksi Buletin Suhuf 2010-2013
- PC. ISNU Sumenep bidang *networking* 2014-2017
- PAC. GP Ansor Ancab Gapura, 2015-Sekarang
- PC. GP Ansor Sumenep 2016-Sekarang
- LP Ma'arif MWC NU Gapura 2015-sekarang
- Anggota Forum Pemuda dan Pemberdayaan Masyarakat Gapura Tengah 2004-sekarang
- Anggota Remaja Masjid As-Sirajiyah Gapura Tengah Gapura Sumenep, 2012-sekarang
- Tim Pakar Forum Kajian Kegamaan Tamidung Batang-Batang 2007-2008.
- Div. Khazanah Komunitas Kajian Kitab Klasik (K-5) Gapura Tengah 2011-Sekarang

- Sekretaris Rislah Zakat Qurban dan Nafaqah (RiZQuNa) Gapura 2011-Sekarang.
- Pembina GPLHK Madura jawa Timur 2016-

d. Karya Tulis/ilmiah

- Kiai, Kantor dan Pesantren; Kupas Tuntas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Nadi Pustaka, Yogyakarta Kerjasama dengan Zath Gapura 2012.
- Biografi Syaikhana Khalil Bangkalan; Panutan Bangsa Abu Nawas-Nya Madura, Nadi Pustaka, Yogyakarta, kerja sama dengan Cahaya Pustaka Gapura, 2012.
- Rarsulullah Tidak Nikah Dini, Cahaya Pustaka Gapura, 2012.
- Pernak-Pernik Dunia Pendidikan, Nadi Pustaka, Yogyakarta, kerjasama dengan Maseghit Press, 2013.
- *Two in One* MoDernis NUsantara; Perkawinan Pemikiran Pendidikan Islam antara KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari, Yayasan Al- Fatah, Yogyakarta, 2014.
- Marwah Studi Islam; Catatan Remeh 56 bersama Prof. Dr. Amin Abdullah, MA Zath Gapura 2014.
- *Sumenep Studies;* Obrolan menjanjikan Pasca Suaramdu-an Yayasan al-Fatah Yogyakrta. 2014.
- Ulama dan Kebebasan Beragama di Madura membaca Pemikiran BASRA, Yayasan al-Fatah Yogyakrta. 2018.

e. Buku Bunga Rampai

- Mozaik Studi Islam; Penjelajahan Konsep Multi Paradigma, Nadi Pustaka, Yogyakarta kerjasama dengan Maseghit Press, 2013.

- Membongkar Patologi Khazanah Kewarganegaraan dalam kacamata lokal-global, Yafat Yogyakrta. 2015.
- Kondusivitas Pendidikan dalam perspektif pembelajaran berbasis lingkungan, dalam buku Mahalnya identitas; Guru yang termarginalkan; refleksi terhadap kehidupan guru Honorer di Kabupten Sumenep, Yogyakarta: Lembaga ladang kata, 2017.
- Generasi Negeri Berdikari; Meneguhkan ijtihad keindonesiaan, membumikan jihad kebangsaan. Yogyakarat: Yafat, 2018

f. Editor Buku

- Editor Buku mahasiswa UINSA Studi Islam; Reaktualisasi Pemikiran Islam Multiperspektif, Yayasan al-Fatah, 2014.
- Editor Buku mahasiswa UINSA Jelajah Aliran dan Paradigma Pendidikan Yafat Yogyakrta. 2014.
- Editor buku Ny. Hj. Djuwairiyah dan H. Abd. Muqid, Spektrum Pendidikan Islam; meneropong Pendidikan berilian Zath Yogyakarta 2016.

g. Pengabdian

- Tim Verifikasi Akreditasi Madrasah MDC Jawa Timur kerjasama antara Kementrian Agama dengan Pemerintah Australia, 2014.
- Penyuluh Narkoba di Organisasi pemuda pemberdayaan masyrakat, Gapura Tengah dan Mushalla Nurul Islam Panagan Gapura. 2016-sekarang.

h. Jurnal

- Integrasi Pemikiran Pendidikan Islam antara KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari (Jurnal Inovasi, Vol. VIII Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, 2014).
- Konsep *Maqashid al-Shariah* Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam tak pernah tuntas Perspektif Jasser Auda, (Jurnal al-Ulum, Universitas Islam Madura (UIM) Vol. I 2014.
- Titik Temu Pemahaman antara Jihad dan Terorisme (Jurnal al-Ulum, Vol. II 2014).
- Analisis Nilai Pendidikan Islam dalam Sinetron Ustadz Foto Copy, STAI Bojonegoro, Jurnal Tuhfah, 2014.
- Pendidikan Responsif Gender; Analisis Pemikiran A. Dardiri Zubairi Jurnal Pelopor Vol. 1 Juni 2015.
- Historisitas Islam Nusantara, Jurnal Pelopor Vol. 2 April 2016.
- Konsep diri dalam interaksi Sosial remaja Masyarakat Gapura, Jurnal Kabilah STAI Nata, 2014.
- Paradigma pendekatan ilmu sosial-humaniora dalam kewarganegaraan dan keberagamaan, Jurnal Teratek STAIM. Vol. 1. 2016.
- *Maqasid Syariah* perspektif Jasser Audah, Jurnal Teratek STAIM. Vol. II. 2017.
- Pembelajaran berbasis lingkungan hidup dalam perspektif lingkungan belajar, Jurnal UIM Pamekasan, vol. 5 2017

i. Prosiding

- Analisis Falsafah Madura Perspektif Pendidikan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal, STKIP PGRI Sumenep
- Dakwah Transformatif Berbasis Pendidikan Multikultural, Prodi PPKn Fak. Ilmu Sosial an Hukum UNESA 30 Agustus, 2017
- Pemberdayaan *Gender* dan Politik Perempuan di Kecamatan Kalianget Senias LP2M UIM Pamekasan. 30 September 2017.

j. Majalah

- UN antara ada dan tiada majalah Manis MA. Nurul Islam Tamidung Batang-Batang, 2011.
- Darurat Bangsa Mengintai Kita**,** Mata Sumenep, Edisi 12, tahun 2015.
- Per (empu) an Madura Punya Rasa, Mata Sumenep, Edisi 14, tahun 2015.
- Pemuda Nusantara yang Kemajuan, Mata Sumenep, Edisi 22, tahun 2015.
- Filosofi *tusatsi mujarrad;* Tawaran suksesi Kepemimpinan Politik-profetik, Mata Sumenep, edisi 27, tahun 2016.

k. Pemateri

- Bedah Buku Kiai, Kantor dan Pesantren; Kupas Tuntas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, di Pendopo Kecamatan Gapura 2012.
- Ke-Organisasian- Ekstra dan Intra Kampus, di Aula STI Al-Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep tahun 2012.

- Bedah Buku Mozaik Studi Islam; Penjelajahan Konsep Multiparadigma, di Graha Lantai II SMA Alif Batu Putih, 2013.
- Bedah Buku *Two in One* MoDernis NUsantara; Perkawinan Pemikiran Pendidikan Islam antara KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari, 2014 di Graha Lantai II MWC NU Gapura September, 2014.
- Dialog FKMS Jokotole, Bulan Ramadhan; Sebagai Sarana Edukasi dalam membentuk insan Islami, September, 2014.
- Bedah Buku *Two in One* MoDernis NUsantara; Perkawinan Pemikiran Pendidikan Islam antara KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari, Pesantren Nurul Qalbi kota Batu Malang, Juli, 2015.
- Sosialisai BKKBN untuk pengelola Pondok Peasantren Situbondo, hotel Bahagia November, 27 November 2015.
- SeminarNasional, Pendidikan dan Kemaritiman berbasis kearifan lokal, 31 Oktober 2016
- Seminar hari sumpah pemuda, HMP PPkn STKIP PGRI, SMA Ambunten Sumenep, Oktober 2016.
- Dialog agama dan buka puasa bersama, UKM Karomah STKIP PGRI Sumenep, 18 Juni 2017.

l. Pemakalah

- Dakwah Transformatif Berbasis Pendidikan Multikultural, Prodi PPKn Fak. Ilmu Sosial an Hukum UNESA 30 Agustus, 2017.
- Pemberdayaan *Gender* dan Politik Perempuan di Kecamatan Kalianget Senias LP2M UIM Pamekasan. 30 September 2017.

m. Penelitian

- Analisis Dampak Lingkungan pada Penanambangan Pasir di Daerah Pantura penelitian bersama LerresNU Sumenep Dana Bapedda Sumenep 2015.
- Dinamika Pendidikan Progresif; Analisis pada SMA dan SMK Berbasis Pesantren di Timur Daya. DIPA STKIP PGRI Sumenep 2015.
- Transmisi Kebijakan Pendidikan; Studi tentang Peran Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS). 2016.
- Analisis Terhadap Persepsi Ulama BASRA tentang kebeabasan beragama di Madura PDP Dikti 2017
- Komunikasi Interpersonal Kiai Poligami Non Indogami di Sumenep, Hibah STAIM Tarate Sumenep 2017.

n. Seminar, Diklat dan Workshop

1. Panitia

- Dialog Eksistensi Musik dalam Islam, di kediaman Mukhlishi, 2008.
- Seminar Pendidikan dalam Upaya Pembangunan Desa, oleh KKN STIKA Desa Banjar Barat Gapura, 2009.
- Ospek STIA Beraji Gapura Sumenep, Membangun Pola Pikir, Kreatif, Kritis dan Inovatif, 2009.
- Seminar Hukum, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Negara, di SDN Gapura Tengah Sumenep, 2009.
- Seminar Ekonomi, Membangun Sinegitas Organisasi di tengah Kepungan Higemoni Kapitalisme, di Graha Lantai II MWC NU Gapura, 2010.
- Seminar Kesehatan, Indahnya Kesehatan dalam Bingkai ke-Islam-an, di SDN Gapura Tengah, 2011.

- Seminar Pertanian, Pemanfaatan Pupuk Organik Pengendalian Hama Tanaman di Pendopo Kecamatan Gapura, 2012.
- Seminar Politik, Menyongsong Tahun Politik dengan Kepemimpinan Profetik, di Pendopo Kecamatan Gapura, 2013.
- Dialog Memahmi Fiqih dengan Faqih, Mushalla a-Hikmah Banjar barat, April 2013.
- Dialog Filosofi Maulid dalam kepemimpinan Profetik; Masjid Bahauudin, Gapura Tengah, Februari, 2014.
- Dialog Peran Tunas Bangsa dalam Pembangunan Desa di Central House Mukhlishi kerjasama KKN STIT Al-Krimiyyah dan Organisasi K5 September 2014.
- Dialog Hijrah dari Pemahaman fiqih-faqih tafaqquh, Kediaman Moh. Luthfi, 2015.
- Workshop Aswaja; Membumikan Amaliah-ilmiah yang dianggap Bid'ah, 7 Februari, 2016.
- Workshop *Talent Exibithion,* Kartini dalam Kehidupan Masa kini, STKIP Mie 2016.
- Rembuk Tani, Sekolah lapang komoditas pangan strategis Nasional WKPP Gapura Tengah BPP. Gapura , 25 Juli 2017.
- Progress report PC. Ansor Sumenep, SKD Batuan Sumenep, 5 Agustus 2017
- Latihan Instruktur GP. Ansor Jawa Timur di Kabupaten Sumenep, SKD Batuan Sumenep, 5-7 Oktober, 2017.
- Diklatsar Banser Satkorcab. Banser Sumenep Sumenep di Kecamatan Gapura, 20-22 Oktober 2017.

2. Internasional

- Seminar *Daur al-Qur'an Karim fi al-Huffazhi ala Kiyan al-Lughah al-Arabiyah,* Auditorium STAIN Pamekasan, 2010.
- Seminar Pentingnya Bahasa Arab di Era Globalisasi, di Aula STI Al-Karimiyyah Beraji Gapura, 2011.
- Seminar, *Kaifa Nabni Bai'ah al-Lughat al-Arabiyah,* Auditorium STAIN Pamekasan, 2011.
- Workshop Penulisan Artikel untuk publikasi Jurnal Nasional dan Internasional Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Oval Surabaya, November, 2015.

3. Nasional

- Seminar, Peran Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Masyarakat, Kementrian Pendidikan Nasional Jakarta kerjasama dengan Yayasan Mambaul Ulum Gapura, 2006.
- Seminar, Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional, di Aula Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, 2006.
- Peresmian dan Orasi Ilmiah bersama Prof. HM. Ridlwan Nasir, MA. Perguruan Tinggi Islam di Pondok Pesantren: Peluang dan Tantangannya, STI Al-Karimiyyah Beraji Gapura, 2008.
- Seminar, Membongkar Patologi Pendidikan: Paradigma Baru Sebagai Upaya Mendongkrak Kualitas Pendidikan Bangsa, Auditorium Gedung F UMSurabaya Lantai IV 2011.

- Relawan Penanggulangan Bencana, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Bandara Juanda Surabaya, 2011.
- Madura dalam perkembangan Nusantara, STKIP PGRI Sumenep, 2015.
- Seminar Penegakan Hukum di Indonesia Graha Adikara Unija Sumenep, November, 2015.
- Peran dan fungsi indusri hulu migas untuk kesejahteraan rakyat; Yayasan Panglima Soedirman SKK Migas Kangean energy Indonesia, STKIP PGRI Sumenep, 28 Juli 2017.
- Sosialisasi empat pilar MPR RI graha Adi poday Sumenep, 17 September 2017.
- Workshop Publikasi ilmiah terindeks dan terakditasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 13 September 2017.
- Simposium Nasional, pembangunan Karakter Indonesia, Gedung sport centre dan Multiporpuse UINSA Surabaya 14 September 2017.

4. Regional

- Diklat Jurnalistik se-Madura oleh OSIS SMA Peasntren Al-In'am, Banjar Timur Gapura Sumenep, 2008.
- Seminar dan Bedah Buku, Romantika Proses Kreatif Menulis, *The Road To The Empire*, oleh UKK-LPM Activita STAIN Pamekasan kerja sama dengan Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Pamekasan, 2009.

- Seminar Menyikapi Seks Bebas *(Free Seks)* dikalangan Remaja, oleh OSIS MA. Nasy'atul Muta'allimin, Gapura Timur Sumenep, 2008.
- Bedah Buku, Jalan Terjal Santri menjadi Penulis, di PP. Nasy'atul Muta'allimin kerja sama dengan Penerbit Muara Progresif, 2010.
- Dialog Islam Kebangsaan, Relasi Ulama' Umara' dan Cendikia dalam Membangun Bangsa, di Hotel Safari Sumenep, 2009.
- Workshop Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menuju Kampus Bebasis Riset tahun 2015, di Aula Lantai II STKIP PGRI Sumenep, 2014.
- Dialog Peran Tunas Bangsa dalam Pembangunan Desa di Central House Mukhlishi kerjasama KKN STIT Al-Krimiyyah dan Organisasi K5 2014.
- Sekolah Riset Bersama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama' Cabang Sumenep di Hotel Dreamland sumenep. 2014.
- Seminar Hukum Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia, STKIP PGRI Sumenep, 2014.
- Pealtihan Pekerti di Garaha Kemahsiswaan Lantai III STKIP PGRI Sumenep, 20-23 Januari 2015.
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Pondok Pesantren, Gedung SKB Batuan Sumenep April 2015.
- PKD PAC. GP Ansor di Graha MWC NU Gapura, Juni 2015.
- Workshop De-Radikalisasi Agama, PW. GP. Ansor Jatim Aula SMA Tarshib, Jadung Dungkek, 27 September, 2015.

- Pelatiahan BKKBN untuk Pengelola Pondok Pesantren, Singosari Malang, Oktober 2015.
- Pelatihan dan Klinik Proposal Penelitian, Graha Adikara Unija oleh LPPM Unija Sumenep, 9 November 2015.
- Daurah Kader Dai, oleh LDNU Gapura di Graha lantai II MWC NU Gapura, 04 Maret 2016.
- PKL GP Ansor Se-Jawa Timur di Gedung SKB Batuan 9-10 April 2016.
- Hasil Rihlah PKL GP Ansor Se-Jawa Timur PP. al-Usymuni Tarate Sumenep, Mie 2016.
- Seminar Nasional Revitalisasi Nilai Pancasila dalam menangkal aliran Transnasional. STKIP PGRI Sumenep, 01 Juni 2016.
- Sosialisasi dan Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) STAIN Pameksan, 28 Juli 2016.
- Workshop rekonsruksi kurikulum, perumusan capaian pembelajaran program studi dan perumusan deskripsi mata kuliah, 22-24 Agustus, 2016.
- Seminar anti Narkoba KT. Serdadu Tamidung, Mari berperstasi tanpa ekstasi, 02 September 2016.
- Workshop mempersiapkan tenaga pendidik professional dan implementasi penyusunan perangkat pembelajaran, 08-13 Maret 2017.
- Bedah Buku, Manajemen, Manusia karya Ahmad Hosaini, MWC NU Gapura, Juli 2017.
- Sosialisasi bahaya Narkoba bersama BNNK Sumenep, di Balai Desa Gapura Tengah 29 Agustus 2017.

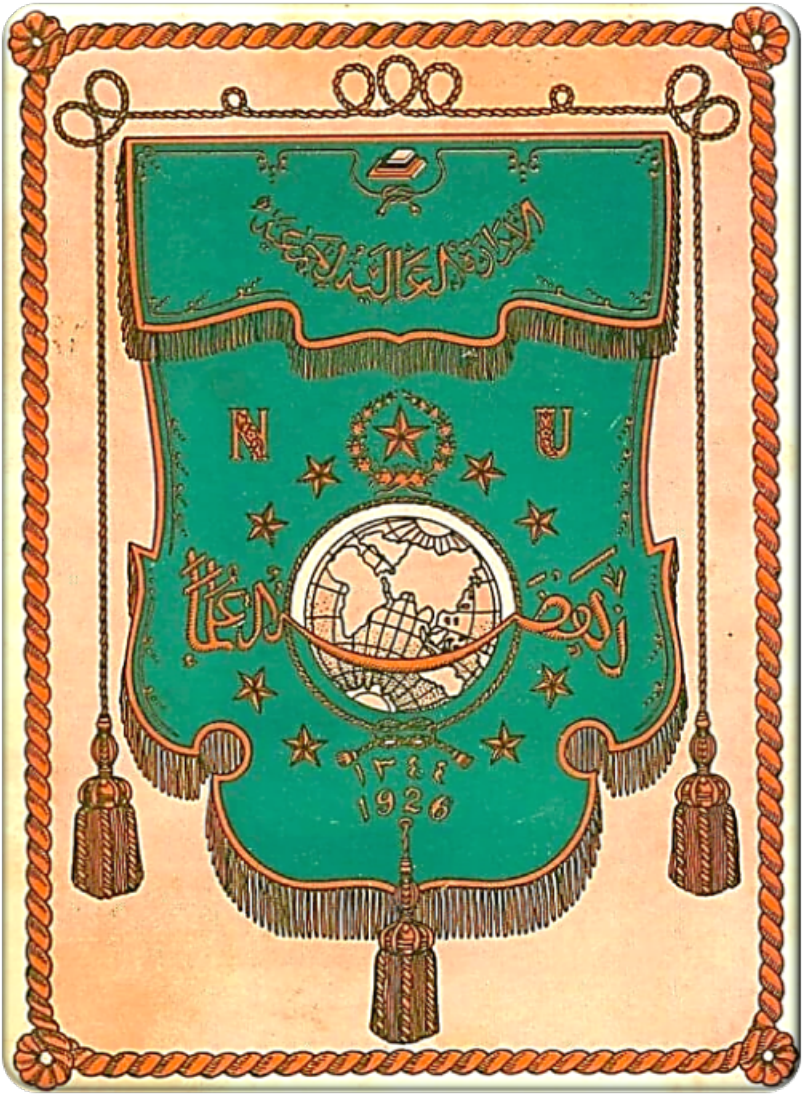
الأمانة العامة للأمم المتحدة
N U
١٣٤٤
1926

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP
PGRI
PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
SUMENEP
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PGRI
PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
SUMENEP
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
NABI